



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BERAU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN
TAHUN 2022

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pada tahun kami pegelakan sa latal Alah SWT, ana bekal rahmat dal mabayahyaNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan tahun 2022 dapat disusun sebagai hasil pertanggung jawaban kinerja OPD selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perekonomian dan Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan kinerja, penjaminan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang telah terjadi pada tahun 2022 dan kinerja yang telah dicapai serta sebagai acuan perbaikan keberlanjutan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Kabupaten Berau.

Diharapkan kinerja yang telah tercapai dapat terus dipertahankan dan yang masih belum memenuhi target dapat ditingkatkan melalui daya dukung dan sumber daya manusia yang memadai.

Ditandai bahwa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan LKIP ini masih tercapai ketuntasan sehingga akan dan akan yang kreatifif sangat diharapkan demi perbaikan realisasi kegiatan dan pencapaian target kinerja, maupun dalam penyusunan laporan ke depan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, serta kita semua selalu mendapat Ampunan berkah dan rahmat Allah SWT. Amin-ya rabbul alamin.

Tanjung Redeb, Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kesehatan Kabupaten Berau



Dr. Mustakin Subianto
NIP. 196703217 194401 1 000

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKJiP ini disusun sebagai tindaklanjut dari menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Peraturan menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Dan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat laporan kinerja pemerintah SKPD.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi,

dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara umum berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat terlaksana dengan baik namun disadari masih banyak hal yang harus di tingkatkan seperti adminitrasi yang di luar kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Personil yang belum memadai, Penerapan aturan yang kadang tidak sepaham antara pemangku kepentingan dengan OPD pelaksana.

Dengan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diharapkan LKJiP ini akan dapat memenuhi unsur – unsur yang dipersyaratkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau	1
1.3 Struktur dan organisasi	3
1.4 Sumber Daya Manusia.....	9
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.1 RENCANA STRATEGIS	20
2.1.1 Visi dan Misi	20
2.1.2 Tujuan dan sasaran	25
2.1.3 Kebijakan, Strategis, Arah Kebijakan dan Program.....	26
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	38
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	44
2.4 Perjanjian Kinerja	62
BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA.....	65
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	65
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	68
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	71
3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.....	74
3.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dan Kinerja tahun lalu.....	76

3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka Menengah yang terdapat pada dokumen strategis Organisasi	79
3.3.4 Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja yang telah dilakukan.....	80
3.3.5 Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya	81
3.3.6 Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	82
3.4 Realisasi Anggaran	88
BAB IV. PENUTUP.....	94

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

- Rencana Kinerja Tahunan
- Perjanjian Kinerja
- Pengukuran Kinerja Tahunan
- Indikator Kinerja Utama
- Matrik Rencana Strategis
- Rencana Aksi
- DUK
- Kartu Inventaris Barang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah Pembangunan Masyarakat Kabupaten Berau seutuhnya yang mana hasilnya dinikmati langsung seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Berau.

Guna melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan hati nurani rakyat, maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini guna meningkatkan keserasian antara pelaksanaan pembangunan dengan aspek lingkungan.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sangat diperlukan sehubungan dengan tugasnya sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK

Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTD.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau.

Adapun tujuan dan sasaran DLHK Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup:
 - a. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
 - b. Terjaganya kualitas air
 - c. Terjaganya kualitas udara
 - d. Meningkatnya tutupan lahan
 - e. Menurunnya Intensitas Emisi GRK
 - f. Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup
 - g. Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau
2. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengolahan/penangan sampah:
 - a. Tertanganinya pengolahan sampah

Dari tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Berau.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Keuangan dan aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahi :
- Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan KLHS
 - Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH
- d. Bidang kebersihan, Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
- Seksi Kebersihan
 - Seksi pengelolaan Sampah
 - Seksi Pengelolaan LB3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
- Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Seksi Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;

- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

f. UPTD

- UPTD Laboratorium Lingkungan

- UPTD Kebersihan Pulau Derawan dan Pulau Maratua

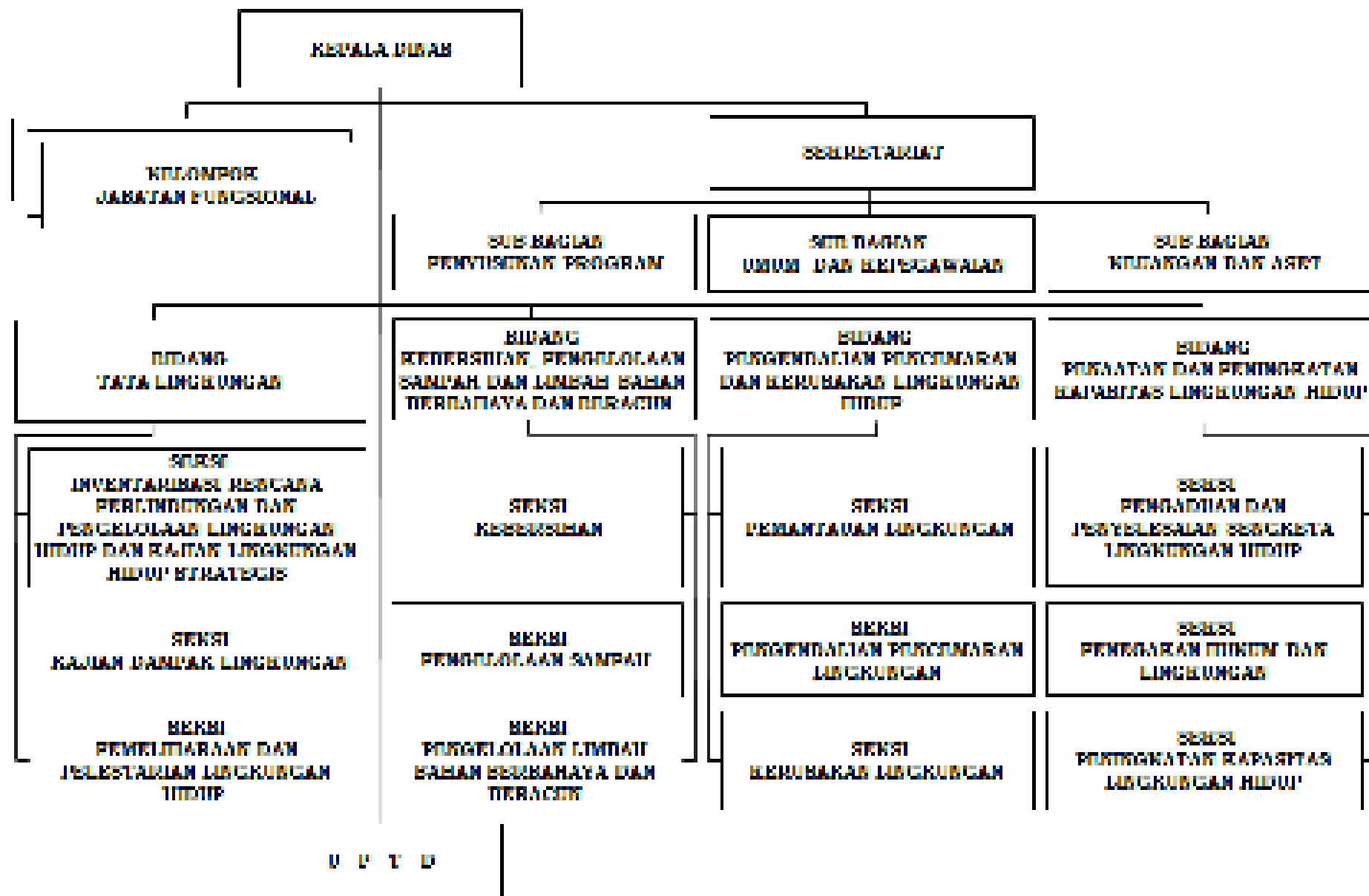
- UPTD Kebersihan Talisayan

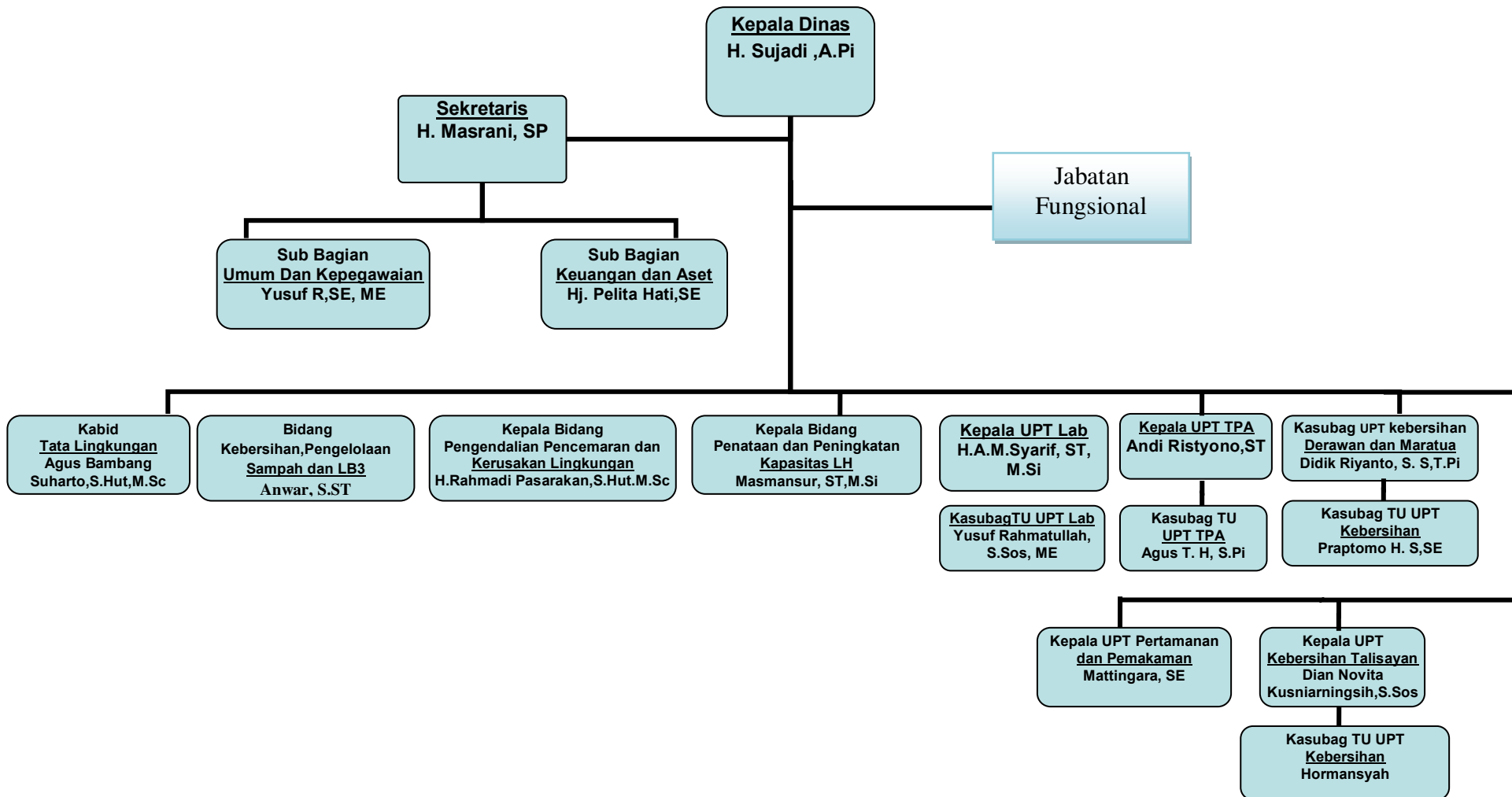
- UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

- UPTD Pertamanan dan Pemakaman

h. Kelompok Jabatan Fungsional:

Struktur organisasi sesuai Peraturan Bupati No. 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:





Salah satu rencana kebijakan pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pembacaan pidato kenegaraan saat pelantikan presiden periode 2019-2024 adalah melakukan pemangkasan atau penyetaraan beberapa jabatan struktural dialihkan ke jabatan fungsioanal. Ruang lingkup yang akan disetarakan adalah Jabatan Administrasi yang terdiri dari Jabatan Administrator (eselon III), Jabatan Pengawas (eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (eselon V). Berdasarkan Permenpan RB No. 28 tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan penyetaraan pejabat struktural eselon IV ke pejabat fungsional (pengawas/pengendali dampak lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau.

Dari hasil penyetaraan, terbentuk struktur organisasi seperti pada halaman 7. Tujuan penyetaraan jabatan adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 75 orang, dimana 59 orang diantaranya adalah laki – laki dan 16 orang diantaranya perempuan. Berdasarkan golongan, ASN golongan IV berjumlah 8 (delapan) orang, golongan III 30 (tiga puluh) orang, golongan II 25 (dua puluh lima) orang, golongan I 12 (dua belas) orang.

Tabel 1 Jumlah pegawai / Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Yang Tersusun Dengan Kriteria Gender.

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kabid	3	1	4
4.	Kepala UPTD	3	1	4
5.	Kepala Seksi	9	4	13
6.	Kasubbag	3	2	5
7.	Staf	39	8	47
	Total	59	16	75

Jumlah terbanyak PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah Golongan III yang berjumlah 30 orang atau 40 % dari jumlah keseluruhan pegawai. Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau berdasarkan Golongan dan Gender.

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
IV	7	1	8
III	20	10	30
II	24	1	25
I	10	2	12
JUMLAH	61	14	75

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2022

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Gender Pegawai

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	6	2	6
STRATA 1/D IV	17	8	25
DIPLOMA III	3	1	4
DIPLOMA II	0	0	0
DIPLOMA I	0	0	0
SLTA	21	1	22
SLTP	8	0	8
SD	6	2	8
JUMLAH	62	13	75

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2022

Dari jumlah tenaga kerja yang ada di DLHK masih terdapat kekurangan tenaga kerja terutama pada Bidang kebersihan dan UPT yang ada.

Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2022 sarana kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut:

*Tabel.4 Sarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Berau*

No.	Sarana Kerja	Jumlah
1.	Gedung Kantor	4 Bangunan
2.	Kendaraan roda 4	18 unit
3.	Kendaraan roda 2	15 unit
4.	Excavator	2 Unit
5.	Buldozzer	2 unit
5.	Well loder	1 unit
6.	Kendaraan roda 6	25 unit
4.	pH Meter	3 unit
5.	TDS meter	2 unit
6.	AAS	1 Unit
7.	AC	19 Unit
8.	Laptop/Note Book	36 unit
9.	Komputer (PC)	27 unit
10.	Handy Cam	1 unit

11.	Printer	42 unit
12.	Telephone (PABX)	1 unit
13.	TV	2 unit
14.	Sound System	2 Unit
15.	Meja kerja	66 Unit
16.	Sofa	2 set
17.	Alat-alat Laboratorium LH	1 paket
18.	Kursi dan meja Ruang Rapat	50 kursi dan 10 meja panjang
19.	Kendaraan Roda 3	6 unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2022

Dari tabel sarana dan prasarana masih terdapat kekurangan terutama kendaraan operasional dilapangan, laptop/PC dan bangunan kantor serta fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam lima tahun kedepan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau beberapa diantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup

Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Berau dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan.

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam di lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang

populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

a. Terus menurunnya kondisi hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian wilayah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem wilayah. Berdasarkan hasil telaah *World Agro Forestry Center dan The Nature Conservancy* (TNC) pada tahun 2009 saja atau selama periode 1990 sampai 2008 sekitar 39.000 hektar Hutan Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi serta menghasilkan emisi karbon dioksida lebih dari 20 juta ton.

Meningkatnya kerusakan itu masih akan terus terjadi seiring tingginya ambisi perusahaan-perusahaan tambang yang ada untuk mencapai target produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Ancaman lain terhadap hutan Berau cukup tinggi jika pembangunan tidak dilakukan dengan bijaksana. Dengan dinamika pembangunan dan kegiatan penambangan yang semakin meningkat, maka kuantitas hutan mulai menurun. Tak hanya itu, komitmen perusahaan juga saat ini semakin menurun.

b. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang tinggi dan beragam di Indonesia. Di

wilayah laut kabupaten ini terdapat terumbu karang yang luas dengan kondisi cukup baik. Keragaman terumbu karang Berau tertinggi kedua di Indonesia setelah Raja Ampat dan ke tiga di dunia. Hutan *mangrove* ditemukan di Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir. Sejumlah pulau-pulau kecil dan ekosistem padang lamun juga terdapat di daerah ini. Beberapa spesies yang dilindungi dapat ditemukan seperti penyu, paus, lumba lumba, duyung dan beberapa spesies lainnya. Perairan Berau dikenal sebagai wilayah yang memiliki habitat penyu hijau terbesar di Indonesia. Selain itu, potensi perikanan dan pariwisatanya masih baik. Namun demikian, di kawasan pesisir dan laut Berau juga terdapat berbagai permasalahan seperti perusakan terumbu karang, penurunan populasi penyu, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Kerusakan daerah pesisir dan indikasi perkembangan Delta Sungai Mahakam dan Berau ke arah lepas pantai, erat sekali hubungannya dengan kegiatan di daratan Kalimantan timur terutama eksploitasi kayu secara liar (*illegal logging*) dan penebangan hutan *mangrove* di daerah pesisir yang makin lama tidak terkontrol. Selain itu, kendati masuk ke dalam salah satu tujuan wisata bawah laut kelas dunia, Kabupaten Berau masih harus berkutut dengan maraknya penggunaan bom dan racun ikan yang digunakan oleh nelayan setempat. Saat ini kerusakan terumbu karang yang masuk dalam

Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau mencapai 60% dari luas total sebesar 480.000 hektare. Ini salah satunya diakibatkan oleh cara menangkap ikan dengan bahan kimia dan bom, selain karena faktor alam. "Kita perkirakan kerusakannya sudah 60%. Memang tidak semua karena manusia, juga karena pemanasan global," ujarnya. Sebanyak 12 pulau yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau, Kalimantan Timur dengan luasan 1,2 juta ha, diperkirakan sebanyak 40 persen atau 480.000 ha merupakan kawasan terumbu karang. Terumbu Karang Berau memiliki ribuan jenis terumbu karang dan puluhan ribu keanekaragaman hayati mendiami pulau itu, termasuk penyu hijau.

Dengan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar beserta permasalahannya, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau perlu dikelola dengan baik dan tepat. Hal ini guna menjaga kelestarian dan berjalannya fungsi dari sumberdaya tersebut sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

c. Citra pertambangan yang merusak lingkungan

Aktifitas pertambangan di Berau yang mempunyai potensi merusak lingkungan jika tidak diatur, diawasi dan dikelola dengan bijak. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*), selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan

habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat dapat merusak lingkungan.

d. **Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*)**

Kabupaten Berau termasuk daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan tersebut terletak baik di perairan maupun daratan. Keanekaragaman hayati flora dan fauna akuatik di Kabupaten Berau yang banyak dijumpai di perairan atau kawasan laut kepulauan Derawan meliputi *mangrove*, lamun (*seagrass-meadows*), terumbu karang, ikan karang, Cetacean dan Manta Rays (kelompok paus dan lumba-lumba), penyu, ubur-ubur, biota lainnya (decapoda, alga, plankton, gastropoda, bentik foraminifera).

Keanekaragaman hayati flora dan fauna daratan di Kabupaten Berau banyak dijumpai di hutan, dan hasil survei fauna darat menunjukkan telah ditemukan sebanyak 42 jenis mamalia, 108 jenis burung, 6 jenis reptil, 9 jenis amfibi, 35 jenis ikan air tawar dan 14 jenis nyamuk. Fauna mamalia terdiri dari 4 jenis primata, 10 jenis rodentia, 3 jenis tupai, 3 jenis kucing, 4 jenis tikus, 9 jenis kelelawar dan 9 jenis mamalia lainnya. Bekantan dan orang utan termasuk mamalia dan merupakan

endemik Pulau Kalimantan, sedangkan 13 jenis mamalia yang termasuk kategori dilindungi, yaitu beruang madu, garangan, kancil, kukang, kijang kuning, kucing hutan, landak, macan dahan, musang hitam, muncak, pelanduk napu, rusa, dan trenggiling. Fauna burung (avifauna) diantaranya adalah beo atau tlung (*Gracula religiosa*), elang bondol (*Hallaster indus*), burung raja udang (*Alcedo meninting*) yang merupakan avifauna kategori dilindungi. Sedangkan reptil kategori dilindungi adalah ular sawa (*Phyton molurus*), dan 3 jenis amphi. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut akan hilang jika tidak dilindungi dan dipelihara dengan bijak.

e. Pencemaran air semakin meningkat

Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktifitas tambang yang tidak ramah lingkungan. Aktifitas tambang batubara di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara tambang terbuka, walaupun ada beberapa yang menggunakan tambang bawah tanah (*underground mining*), sehingga akan berdampak terhadap perubahan bentang alam, sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Dampak ini secara otomatis akan mengganggu ekosistem di atasnya, termasuk tata air (Subardja, 2007). Menurut Sayoga (2007) permasalahan lingkungan dalam aktivitas pertambangan batubara umumnya terkait dengan Air Asam Tambang (AAT) atau *Acid Mine Drainage* (AMD). Air tersebut

terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair. Pestisida dan herbisida yang berlebih dari perkebunan kelapa sawit juga berpotensi mencemari sungai. Pengelolaan limbah yang kurang baik (membuang langsung ke sungai) mengakibatkan air tercemar, kotor, dan bau yang efeknya berbahaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Marganingrum dan Noviardi (2010) diketahui bahwa aktifitas tambang secara langsung maupun tak langsung mencemari air. Hasil analisis data yang diperoleh baik di lapangan maupun analisis laboratorium, baik dari sampel air maupun sampel tanah, menunjukkan bahwa keasaman air di sepanjang Sungai Lati lebih disebabkan oleh faktor lingkungan di sekitar penambangan batubara, daripada pencemaran dari limbah hasil pengolahan batubara. Hal ini ditunjukkan dengan pH sampel air dari outlet pengolahan sebesar 6,3 pada saat hujan dan 9,7 pada saat tidak hujan. Setelah mendapatkan masukan dari aliran sungai yang berasal dari disposal (A5), pH Sungai Lati kembali turun pada nilai 4. Oleh karena itu pengelolaan lahan bekas tambang perlu dilakukan secermat mungkin untuk menghindari kontak dengan udara dan air dari luar. Untuk meminimalisir polutan dari lokasi bekas tambang ataupun tanah disekitar penambangan batubara yang kaya akan mineral sulfide.

f. **Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun**

Pencemaran udara di Kabupaten Berau lebih disebabkan adanya pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat. Kualitas udara di Tanjung Redeb semakin menurun saat musim tanam tiba atau pembukaan lahan. Ini tidak lain akibat gangguan asap tebal yang mengurung langit akibat pembakaran lahan. Selain itu pencemaran udara juga disumbang dari asap kendaraan, pembakaran sampah di rumah tangga, asap industri. Hal ini tentu memerlukan pengaturan dan pemahaman kepada masyarakat serta perlu segera diambil langkah antisipasi atau mitigasi agar kedepannya kondisi udara jadi lebih baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencans Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan konsisten dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Khususnya meningkatkan kualitas lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat

kampanye, maka visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

Misi Ketiga: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan di berbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan diharapkan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Peningkatan sarana dan prasarana publik diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup

Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dengan meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup berarti ada upaya dari manusia untuk meningkatkan kualitas lingkungan atau ekosistem agar dapat membawa manfaat bagi makhluk hidup sekitarnya.

Kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari

misi ketiga yaitu “Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil dan Berwawasan Lingkungan” . Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Berau mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi Pembangunan Tahun 2021-2026

Strategi	Sasaran
1. Pengendalian pencemaran air, udara, dan peningkatan tutupan lahan	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup
2. Pengendalian pencemaran air	Terjaganya kualitas air
3. Pengendalian pencemaran udara	Terjaganya kualitas udara
4. Peningkatan Tutupan Lahan	Meningkatnya Tutupan Lahan
5. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan	Menurunnya Intensitas Emisi GRK
6. Mengoptimalkan pengawasan terhadap izin lingkungan	Tertibnya pengawasan izin lingkungan
7. Meningkatkan pembangunan taman dan ruang terbuka hijau	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup
8. Terpeliharanya ruang terbuka hijau	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau

<p>9. a. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan/ penanganan sampah</p> <p>b. Penambahan tenaga lapangan dalam pengelolaan/ penanganan sampah</p>	<p>Tertanganinya pengelolaan sampah</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

Beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah diantaranya yaitu:

1. Menurunkan pencemaran air dari sumbernya

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah dengan menurunkan pencemaran air dari sumbernya. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus memperhatikan kualitas air demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mensinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Salah satu

dampak negatif kemajuan ilmu dan teknologi yang tidak digunakan dengan benar adalah terjadinya polusi (pencemaran). Polusi merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lain yang merugikan kedalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Oleh karena itu transformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi serta resiko bencana.

2. Pengendalian pencemaran udara

Masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau saat ini di dominasi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Berau. Laju urbanisasi yang tinggi, motorisasi dan industrialisasi telah menyebabkan permasalahan pencemaran udara yang menyebabkan pencemaran udara menjadi salah satu ancaman yang serius

terhadap kesehatan masyarakat, masyarakat miskin perkotaan, dan produktivitas nasional.

Semakin peliknya masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau menyebabkan kekhawatiran berbagai pihak akan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang. Udara banyak mengandung polutan, penipisan lapisan ozon yang bisa mengganggu ekosistem bumi dan efek rumah kaca. Selain disebabkan oleh faktor alam, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh manusia, misalnya dari kendaraan bermotor, kegiatan industri dan sebagainya. Selain dapat membahayakan lingkungan, pencemaran udara juga dapat membahayakan kesehatan manusia.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara yang lebih lanjut hendaknya dilakukan pengendalian pencemaran udara dengan menjaga kebersihan udara dan meminimalkan pencemaran udara, misalnya tidak memakai kendaraan bermotor yang sudah tua, tidak membuang gas yang berbahaya secara sembarangan terutama bagi kegiatan industri, dan lain sebagainya agar kebersihan udara Kabupaten Berau tetap terjaga.

3. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)

Isu perubahan iklim yang semakin hari menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani, tidak terlepas dari dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia termasuk di Kabupaten Berau. Posisi geografis Kabupaten Berau yang terletak di daerah tropis dan kepulauan menjadikan sangat rentan

terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memandatkan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup diperlukan upaya diantaranya dengan cara pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka menurunkan emisi GRK, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *business as usual* pada tahun 2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global.

Pemerintah Kabupaten Berau harus melakukan berbagai kegiatan nasional dan sektoral yang dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK seperti program berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pemanfaatan teknologi energi bersih, pengurangan pemakaian BBM bersubsidi, khususnya dengan gas dan energi terbarukan, program konservasi energi dan lain-lain.

Sinergitas kebijakan lintas Kementerian dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dapat mendorong pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Untuk itu, masyarakat sudah harus bergerak ke dalam kegiatan konkrit yang berwawasan lingkungan.

4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan sampah. Kehadiran sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersial maupun industri tidak bisa dihindari bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu.

Penanganan sampah di Kabupaten Berau dilakukan dengan mengangkut sampah dari TPS dan dari rumah – rumah kemudian di buang ke TPA (tempat pembuangan Akhir).

Berdasarkan uraian tersebut pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan di TPA). Sampah dikumpulkan dari sumbernya kemudian diangkut ke TPS dan terakhir ditimbun di TPA, tetapi reduksi sampah dengan mengolah sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk yang berguna perlu dipikirkan.

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu.

Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh SKPD yang terlibat di dalamnya.

c. Program

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, pada Anggaran tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 60.489.962.582 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 9.663.864.672
2. Belanja Langsung = Rp. 50.826.097.910

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 9 (sembilan)

Program, 16 (enam belas) kegiatan, 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan Kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.5

Tabel 5. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Satuan	B`esarnya Anggaran
1	2	3	4
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	Rp	18,970,583,138
a.	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Rp	139,983,500
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	130,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	9,983,500
b.	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Rp	9,934,032,672
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp	9,663,864,672
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	270,168,000
c.	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Rp	114,500,000
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	114,500,000
d.	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Rp	634,893,100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	16,649,500
7	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Rp	196,622,700
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	54,976,000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp	32,644,900
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	5,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	329,000,000

e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	632,233,100
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	522,585,000
13	Pengadaan Mebel	Rp	109,648,100
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	4,953,970,516
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,102,200
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	294,202,800
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	4,654,665,516
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2,560,970,250
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	2,249,983,150
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	29,000,000
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	250,000,000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	31,987,100
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	825,500,000
g.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp	825,500,000
21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp	825,500,000
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2,378,102,600
h.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	695,469,900
22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Rp	193,604,600
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	229,500,000

24	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	272,365,300
i.	<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	1,502,808,500
25	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp	1,502,808,500
j.	<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	179,824,200
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan unsur Pencemar	Rp	179,824,200
IV.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	23,375,945,560
k.	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Rp	23,375,945,560
27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		21,832,982,660
28	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		1,542,962,900
V.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Rp	234,362,100
l.	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Rp	234,362,100
29	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	234,362,100
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	455,804,100
m.	<i>Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	455,804,100
30	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	280,808,500
31	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	174,995,600
VII.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	678,809,700
n.	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	678,809,700

32	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp	310,081,600
33	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp	150,000,000
34	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		218,728,100
VIII.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	164,378,900
o.	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	164,378,900
35	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp	164,378,900
IX.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	13,406,476,484
o.	<i>Pengelolaan Sampah</i>	Rp	13,406,476,484
36	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	6,634,177,784
37	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	398,626,600
38	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	6,373,672,100
	<i>Jumlah Belanja Langsung</i>	Rp	60,489,962,582

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2022, dengan Anggaran Rp. 60.489.962.582 terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Untuk tahun 2022 ini ada penambahan anggaran dana DBH (Dana Reboisasi) sebesar Rp. 17.612.485.700 yang masuk dalam batang

tubuh anggaran DLHK, yang terbagi dalam 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp 16.976.905.700 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.847.839.332, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000 dan realisasi sebesar Rp 142.964.035, serta Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp 400.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 206.082.481. Total keseluruhan realisasi keuangan DBHDR tahun 2022 sebesar Rp 3.196.885.848, dimana realisasi fisik kegiatan yang banyak menyerap anggaran adalah Belanja Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Belanja Pengadaan Kendaraan Operasioanal Dump Truck dan Pick Up) dan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Belanja Modal Masterplan RTH dan DED RTH) pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, penetapan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 01 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja

Utama daerah berdasarkan RPJMD merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2022 adalah :

1. Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca

Indikator kinerja utama OPD berdasarkan Rencana Strategis DLHK tahun 2021-2026 adalah:

1. Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
5. Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan
6. Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
7. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota
8. Terpeliharanya ruang terbuka hijau
9. Presentasi jumlah sampah yang tertangani

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat mempengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi ketiga yaitu "Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, dan berwawasan lingkungan". Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Terjaganya Kualitas Air
- Terjaganya Kualitas Udara
- Meningkatnya Tutupan Lahan
- Menurunnya Intensitas Emisi GRK
- Tertibnya pengawasan terhadap izin Lingkungan Hidup
- Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap Izin Lingkungan Hidup
- Meningkatnya Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau
- Tertanganinya Pengelolaan Sampah

VISI: MEWUJUDKAN BERAU MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL UNTUK TRASFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Kondisi awal	TARGET TAHUNAN						Target Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi III : Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan										
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup									
1	Meningkatkan indeks indeks kualitas lingkungan hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup		78,63	78,73	78,83	78,93	79,03	79,13	79,13
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran indeks kualitas air		56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,69	56,69
3	Terjaganya Kualitas Udara	Hasil pengukuran indeks kualitas udara		85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47	86,47
4	Meningkatnya Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan		89,789	89,794	89,799	89,804	89,809	89,814	89,814

5	Menurunnya Intensitas Emisi GRK	Jumlah Emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan		406.000 ton Co2 eq	391.466 ton Co2 eq	379.179 ton Co2 eq	366.998 ton Co2 eq	354.906 ton Co2 eq	342.901 ton Co2 eq	342.901 ton Co2 eq
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan terkait penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20 kali Pembinaan/ Pengawasan	20 kali Pembinaan/ Pengawasan	20 kali Pembinaan/ Pengawasan	20 kali Pembinaan/ Pengawasan	20 kali Pembinaan/ Pengawasan	20 kali Pembinaan/ Pengawasan	20 kali Pembinaan/ Pengawasan
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah		7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau		4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi

2	Meningkatkan pengelolaan persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengolahan/penanganan sampah									
	Tertanganinya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani		74%	73%	72%	71%	70%	69%	69%

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja DLHK Kabupaten Berau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DLHK tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja (RENJA) DLHK Kabupaten Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Berau selama tahun lalu dan perkiraan target tahun 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahun 2022

Kode					Uraian program/ sub kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja				Pagu indicator (2021)	
							Progran/outcome		Sub Kegiatan/output		Sub Kegiatan	Program
							Uraian	target	Uraian	target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							DLHK
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							38,295,000,000
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terlaksanan ya penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan	90%			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Kab. Berau				Tersusunnya dokumen program dan kegiatan lingkungan	1 Dokumen	150,000,000

									n hidup			
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Berau			Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD	1 Dokumen	10,000,000	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Berau			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	81 Orang	6,000,000,000	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau			Tersedianya honor pengelola keuangan	12 Orang	180,000,000	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Berau			Tersedianya peralatan listrik dan elektronika	12 Bulan	10,000,000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	150,000,000	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau			Tersedianya makan dan minum	12 Bulan	45,000,000	

									rapat			
2	11	01	2.06	05	Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan	Kab. Berau			Tersedian ya barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Kab. Berau			Tersedian ya surat kabar dan majalah	12 Bulan	5,000,000	
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD	Kab. Berau			Tersedian ya belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah	12 Bulan	250,000,000	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Kab. Berau			Jumlah surat	12 Bulan	10,000,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Kab. Berau			Tersedian ya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	250,000,000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Kab. Berau			Terbayarn ya honor pegawai tidak tetap	12 Bulan	5,500,000,000	

2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau			Tersedian ya biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas	12 Bulan	2,000,000,000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau			Tersedian ya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	20,000,000	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Berau			Tersedian ya jasa perbaikan gedung kantor	12 Bulan	80,000,000	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau			Tersedian ya jasa / peralatan kebersihan	12 Bulan	15,000,000	
					PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	90%				
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS rencana tata ruang	Kab. Berau			Terlaksananya penyusunan KLHS rencana detail tata ruang	1 Dokumen	350,000,000	

					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	90%				
2	11	0 3	2. 01	0 1	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan, Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	Kab. Berau			Tersedian ya Kelengkap an Perizinan PPLH (Izin IPAL, Domestik, dan LA) dan Tercapai ya Penurunan beban pencemar dari setiap sumber pencemar	13 Kecam atan	350,000,000	
2	11	0 3	2. 01	0 2	Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Kab. Berau			Tersedian ya Laporan Pemantau an dan Pelaporan Aksi Mitigasi Penurunan	1 Dokum en	150,000,000	

									Emisi GRK			
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota	Kab. Berau			Terlaksananya Pengoperasian Laboratorium Uji dan terlaksananya pengujian air dan udara	50 Dokumen	200,000,000	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Kab. Berau			Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai, Waduk, Bendungan, Danau, Sumber Air Dan Kualitas Udara Ambien	13 Kecamatan	350,000,000	

2	11	03	2.02	02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Berau			Tersedian ya Laporan pencemaran lingkungan	13 Kecamatan	150,000,000	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Berau			Tersedian ya data dan Laporan Pencemaran Lingkungan	13 Kecamatan	150,000,000	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Kab. Berau			Tersedian ya data dan Laporan Inventarisasi Sumber Pencemar	13 Kecamatan	200,000,000	
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Kab. Berau			Tersedian ya data dan Laporan Unsur Pencemar	13 Kecamatan	150,000,000	
2	11	03	2.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Kab. Berau			Tersedian ya data dan laporan	13 Kecamatan	150,000,000	

									remediasi			
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Berau			Tersedianya data dan laporan rehabilitasi	13 Kecamatan	150,000,000	
2	11	03	2.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Kab. Berau			Tersedianya data dan laporan restorasi	13 Kecamatan	150,000,000	
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Terpeliharaan	90%				
2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Kab. Berau			Tersusunnya Profil Keanekaragaman Hayati Kab. Berau	1 Dokumen	400,000,000	

2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perkotaan di Kec. Tanjung Redeb, Kec. Sambaliung, Kec. Gunung Tabur dan Kec. Teluk Bayur			Terpeliharanya RTH Publik di perkotaan	12 bulan	5,000,000,000	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Perkotaan di Kec. Tanjung Redeb, Kec. Sambaliung, Kec. Gunung Tabur dan Kec. Teluk			Bertambahnya RTH Publik yang dibangun dan RTH Publik yang direnovasi	5 lokasi	1,000,000,000	

						Bayur						
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	90%				
2	11	0 5	2. 01	0 2	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab.B erau			Untuk mencegah dan menangu langi pencemara n atau kerusakan lingkunga n hidup yang diakibatk n oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas	13 kecama tan	500,000,000	

								lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali			
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--	--

					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	90%				
2	11	06	2.01	01	Fasilitas pemenuhan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau ijin PPLH	Kab. Berau			Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan dan	100 Dokumen	150,000,000	

									Tersedian ya Pelayanan Dokumen Lingkunga n Berbasis Online			
2	11	0 6	2. 01	0 3	Pengawasan usaha dan atau kegiatan yang ijin lingkungan hidup, ijin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Kab.B erau			Meningkat nya ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam ijin lingkunga n dan pengawasa n ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan	50 Pelaku Usaha /Kegiat an	200,000,000	
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINHKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Meningkatn ya Kesadaran Masyarakat dan Kepedulian Masyarakat terhadap Lingkungan	90%				

							Hidup					
2	11	08	2.01	01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Kab.Berau Kec.Teluk Bayur Kampung .Tumbit Melayu			Kepedulian masyarakat terhadap kampung iklim	1 Kampung	100,000,000	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Kab.Berau			Terlaksananya kegiatan peduli lingkungan hidup	1 Event	150,000,000	
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Kab.Berau			Jumlah sekolah mendapatkan adiwiyata	4 Sekolah	100,000,000	
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Terselesaikannya Jumlah Pengaduan Masyarakat	90%				

2	11	10	2.01	01	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap (PPLH) Kabupaten/Kota	Kab.Berau			Terselesainya pengaduan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Pengaduan	150,000,000	
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Terkelolanya Sampah	90%				
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	kab. Berau			Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah	10 kali	350,000,000	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Berau			Terkelolanya Jumlah Timbulan Sampah	4 Kecamatan	7,000,000,000	

2	11	1 1	2. 01	0 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Berau			Mewujudkan Kabupaten Berau yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan	13 kecamatan	1,000,000,000	
2	11	1 1	2. 01	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Berau			Tersedianya prasarana dan sarana operasional pengelolaan persampahan	4 lokasi	5,000,000,000	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemilik instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atasan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Berau, perjanjian kinerja kepala DLHK di tanda tangani oleh Bupati Berau, eselon III ditandatangani oleh eselon II, eselon IV ditandatangani oleh eselon III, Pejabat Fungsional di tandatangani eselon II dan untuk pelaksana ditandatangani oleh eselon IV, eselon III dan Sekretaris.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari, 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

()

()

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon

NO	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1			
2			
3			

Program Kegiatan

Anggaran

- 1.
- 2.

Rp. -
Rp. -

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pada tabel berikut masih mengacu pada indikator RENSTRA 2016-2021.

Beberapa Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun Lalu	Realisasi Tahun 2022
----	---------	-------------------	-----------------------	-------------------------

	1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup	76,37	74,75
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,09	53,48
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara	85,32	83,76
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	94,64	94,64
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	403.903	440.918
6	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	45,71	45,71
7	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap	20 kali pembinaan/ pengawasan	20 kali pembinaan/ pengawasan

		izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	7 pengaduan	7 Pengaduan
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	4 lokasi	4 lokasi
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	45,71%	46,98%

Dari tabel di atas, perbandingan antara tahun 2022 dan tahun sebelumnya, beberapa indikator kinerja ada yang nilainya lebih tinggi, sama, ataupun kurang dari tahun sebelumnya. Untuk sasaran IKLH, IKU, IKA, nilainya lebih rendah dari tahun lalu, namun IKLH dan IKU masih dalam kategori baik, IKA dalam kategori sedang, IKTL dalam kategori sangat baik. Untuk sasaran tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan

hidup, tertanganinya pengaduan terhadap izin lingkungan hidup dan meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau, nilai realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Untuk sasaran menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK), nilai realisasi tahun 2022 lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau terealisasi dengan prosentase 46,98 %. Persentase tersebut melebihi dari yang ditargetkan sebesar 73%. Tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja adalah mempertahankan kinerja yang sudah terealisasi dengan baik serta mengoptimalkan pengolahan dan penanganan sampah.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian indikator Kinerja Utama tahun 2022 merupakan penilaian beberapa indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam program kegiatan dan menjadi IKU OPD yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup	78,73	74,75

2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,39	53,48
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara	86,07	83,76
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,794	94,64
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	391.466	440.918
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 kali pembinaan/ pengawasan	20 kali pembinaan/ pengawasan
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah	7 pengaduan	7 Pengaduan

		kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota		
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	4 lokasi	4 lokasi
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	73%	46,98%

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2022, dapat dievaluasi dan dianalisa capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4

1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup	78,73	74,75
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,39	53,48
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara	86,07	83,76
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,794	94,64
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	391.466	440.918
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 kali pembinaan/ pengawasan	20 kali pembinaan/ pengawasan

7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	7 pengaduan	7 Pengaduan
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	4 lokasi	4 lokasi
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	73%	46,98%

Melihat capaian kinerja pada tabel diatas, untuk hasil perhitungan IKLH yaitu 74,75, nilai termasuk dalam kategori baik walaupun belum memenuhi target senilai 78,73. Hal ini dipengaruhi oleh hasil pengukuran indeks kualitas air dan udara yang belum memenuhi target yaitu 53,48 dan 83,76 dari 56,39 dan 86,07. Untuk nilai indeks tutupan lahan pada tahun 2022 melebihi dari target yang ditentukan yaitu 94,64 dari 89,794. Tercapainya target kinerja tersebut dapat dicapai melalui upaya mitigasi

disebabkan baiknya mitigasi dalam hal upaya penutupan lahan. Dari tabel tersebut terlihat emisi yang dapat diturunkan senilai 440.918, melebihi dari nilai yang ditargetkan yaitu 391.466. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan upaya mitigasi dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan bahan/emisi gas rumah kaca di atmosfer seperti gas buang kendaraan, pembakaran batubara di PLTU, pembuangan limbah, sampah dan bahan emisi lainnya. Demikian pula untuk indikator kinerja Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin, tahun 2022 target dapat terpenuhi dengan kuantitas pembinaan dan pengawasan sebanyak 20 kali pembinaan/pengawasan. Begitu pula dengan indikator kinerja Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota, target dapat tercapai sebanyak 7 pengaduan dapat tertangani. Untuk indikator terpeliharanya ruang terbuka hijau, target dapat terpenuhi di 4 lokasi yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Sambaliung. Presentase jumlah sampah yang tertangani sudah memenuhi target yaitu 46,98% dari 73%. Secara umum target kinerja dapat tercapai dengan baik menunjukkan kinerja DLHK juga baik.

3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup	78,73	74,75
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,39	53,48
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara	86,07	83,76
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,794	94,64
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	391.466	440.918
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	20 kali pembinaan/ pengawasan	20 kali pembinaan/ pengawasan

		diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	7 pengaduan	7 Pengaduan
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	4 lokasi	4 lokasi
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	73%	46,98%

Membandingkan antara target kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja, untuk beberapa sasaran, capaian kerjanya kurang dari target yang telah ditetapkan seperti meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, terjaganya kualitas air, terjaganya kualitas udara, tertanganinya pengelolaan sampah. Untuk capaian kinerja beberapa sasaran, hasilnya melebihi dari target yang ditetapkan seperti meningkatnya tutupan

lahan dan menurunnya intensitas emisi GRK. Untuk capaian kinerja sasaran tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup, meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau sama dengan target yang ditetapkan. Namun demikian realisasi kinerja tahun 2022 umumnya masih dalam kategori baik walaupun capaian kinerja beberapa indikator belum memenuhi sebagaimana target yang telah ditetapkan.

3.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Berdasarkan Renstra (2021-2026), ada 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang menjadi sasaran OPD dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2022 umumnya berbeda dengan capaian tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa indikator yang sama seperti tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup, tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup, meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau, namun demikian secara umum target capaian kinerja terealisasi dengan kategori baik.

Beberapa Indikator Kinerja Sasaran realisasi Tahun ini dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun Lalu	Realisasi Tahun 2022

	1	2	3	4
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan indeks kualitas lingkungan hidup	76,37	74,75
2	Terjaganya kualitas air	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	56,09	53,48
3	Terjaganya kualitas udara	Hasil pengukuran Indeks kualitas udara	85,32	83,76
4	Meningkatnya tutupan lahan	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	94,64	94,64
5	Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	403.903	440.918
6	Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah	20 kali pembinaan/ Pengawasan	20 kali pembinaan/ pengawasan

		Kabupaten/Kota		
7	Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditertibkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	7 pengaduan	7 Pengaduan
8	Meningkatnya pengelolaan taman dan ruang terbuka hijau	Terpeliharanya ruang terbuka hijau	4 lokasi	4 lokasi
9	Tertanganinya pengelolaan sampah	Presentase jumlah sampah yang tertangani	45,71%	46,98%

Melihat hasil capaian kinerja tahun 2021 dan 2022, pada umumnya secara keseluruhan memenuhi target, kecuali di tahun 2022 untuk indikator menurunnya tingkat emisi karbon (ton CO₂eq) belum memenuhi karena nilai yang dicapai masih melebihi target yaitu 440.918 ton CO₂eq, namun untuk tahun 2021 target indikator menurunnya tingkat emisi karbon terpenuhi dengan nilai 403.903 ton CO₂eq. Untuk capaian kinerja persentase jumlah sampah yang tertangani tahun 2021, terpenuhi target secara signifikan

yaitu 45,71% dari target sebesar 74%. Hal ini sama dengan capaian kinerja tahun 2022 dimana realisasi dimana terealisasi 46,98 dari target sebesar 73%.

3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Strategis Organisasi

Sasaran kinerja RPJMD 2021-2026 untuk DLHK adalah meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang mana dijabarkan lagi dalam RENSTRA 2021-2026 DLHK menjadi 9 (Sembilan) sasaran dan indikator kinerja. Dalam RPJMD terkandung 1 (satu) sasaran program terdiri dari 3(tiga) indikator kinerja, yang mana indikator kinerja tersebut juga terkandung di RENSTRA 2021-2026.

Setelah terlaksananya program dan kegiatan, dapat dilihat bahwa untuk indikator hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air dan Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara nilainya dibawah target, tetapi masih dalam kategori sedang dan baik. Sedangkan untuk indikator indeks kualitas tutupan lahan nilainya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 94.64. Memperhatikan hal tersebut bahwa secara umum kinerja OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dalam kategori baik sehingga dapat ditingkatkan dan dipertahankan untuk pencapaian tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target RPJMD/Renstra	Realisasi 2022
	1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	56,29	53,48
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	85,97	83,76
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	94,789	94,64

3.3.4 Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yang telah dilakukan

Pada capaian kinerja pada tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan target RPJMD dan Renstra ada beberapa kegiatan yang berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dana, sumber daya manusia, dan kerjasama di lingkup DLHK serta antar instansi yang terkait. Selain itu adapula beberapa kegiatan yang tidak berjalan secara optimal termasuk penggunaan DBH-DR. Tidak optimalnya pelaksanaan pelaksanaan DBH-DR karena masuknya DBH-DR di pertengahan tahun, sehingga pekerjaan yang dapat

dilaksanakan diantaranya adalah pekerjaan pembuatan masterplan yang termasuk dalam belanja Modal Bangunan Gedung, pengadaan dumptruck dan pick up yang termasuk dalam Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, sedangkan pekerjaan fisik untuk pembuatan taman tidak dapat dilaksanakan mengingat waktu yang tidak memungkinkan, karena dalam pembangunan akan memakan waktu termasuk proses lelang.

Selain masalah tersebut di atas beberapa hal yang juga menjadi kendala diantaranya yaitu, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, adanya laboratorium lingkungan hidup yang belum terakreditasi. Untuk keberhasilan yang dicapai disebabkan adanya komitmen yang baik semua unsur OPD untuk menyelesaikan pekerjaan, serta kerjasama yang baik antar unsur OPD di DLHK.

3.3.5 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Pada tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 75 orang, dimana 59 orang diantaranya adalah laki – laki dan 16 orang diantaranya perempuan. Sumber daya manusia untuk dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan masih terbatas terutama untuk tenaga ASN, personil UPTD, sehingga pelaksanaan tugas dioptimalkan dengan ketersediaan tenaga yang ada termasuk non ASN (PTT/tenaga swakelola).

3.3.6 Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, maka ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 yaitu 9 (sembilan) Program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel realisasi program/kegiatan Anggaran belanja langsung dan Tidak Langsung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	18.970.583.138	17.453.014.300	92,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	139.983.500	128.654.455	91,90
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	130.000.000	128.654.455	98,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	9.983.500	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	9.934.032.672	9.208.521.156	92,69
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	9.663.864.672	8.955.598.156	92,67
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	270.168.000	252.923.000	93,61
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	114.500.000	111.020.000	96,96
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	114.500.000	111.020.000	96,96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	634.893.100	588.164.192	92,63

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	16.649.500	14.448.700	86,78
7	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp	196.622.700	186.502.700	94,85
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	54.976.000	52.283.000	91,10
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	32.644.900	21.076.700	64,56
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	4.390.000	87,8
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	329.000.000	309.463.092	94,06
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	632,233,100	141.195.500	22,33
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		522,585,000	40.659.000	7,78
13	Pengadaan Mebel		109,648,100	100.536.500	91,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4,953,970,516	4.768.155.611	96,24
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,102,200	2.880.000	56,44
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	294.202.800	222.024.486	75,46
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	4.654.665.516	4.571.297.265	98,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.560.970.250	2.504.837.817	97,80
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	2.249.983.150	2.217.576.264	98,55
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	29.000.000	21.530.000	74,24
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	250.000.000	246.922.553	98,76
20	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	31.987.100	18.809.000	59,80
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	825.500.000	403.503.874	48,87
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp	825.500.000	403.503.874	48,87

21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp	825.500.000	403.503.874	48,87
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.378.102.600	2.178.627.570	91,61
	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	695.469.900	655.635.761	92,40
22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp	193.604.600	178.904.900	92,40
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	229.500.000	207.320.546	90,33
24	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	272.365.300	269.410.315	98,91
	<i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	1.502.808.500	1.380.527.087	91,86
25	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Rp	1.502.808.500	1.380.527.087	91,86
	<i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	Rp	179.824.200	142.464.722	92,24
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Rp	179.824.200	142.464.722	79,22
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp	23.375.945.560	9.139.396.604	39,09
	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i>	Rp	23.375.945.560	9.139.396.604	39,09
27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	21.832.982.660	7.651.703.282	35,04
28	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp	1.542.962.900	1.487.693.322	96,41
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp	234.362.100	207.376.850	88,48
	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Rp	234.362.100	207.376.850	88,48
29	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	234.362.100	207.376.850	88,48

VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	455.804.100	429.899.172	94,31
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	455.804.100	429.899.172	94,31
30	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	280.808.500	265.754.072	94,63
31	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	174.995.600	164.145.100	93,79
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	678.809.700	578.010.533	85,15
	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	678.809.700	578.010.533	85,15
32	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp	310.081.600	217.256.161	70,07
33	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp	150.000.000	145.999.707	97,33
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp	218.728.100	214.754.665	98,18
VIII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	164.378.900	145.297.850	88,39
	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	Rp	164.378.900	145.297.850	88,39
34	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp	164.378.900	145.297.850	88,39
IX	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	6.905.566.126	6.325.632.785	91,60
	<i>Pengelolaan Sampah</i>	Rp	13.406.476.484	12.812.278.285	95,56
35	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Rp	6.634.177.784	6.468.030.852	82,04

	Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				
36	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	398.626.600	362.357.495	34,44
37	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Rp	6.373.672.100	5.981.889.938	11,69
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	60.489.962.582	43.347.405.038	71,66

Dari hasil analisa terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2022, dengan sebesar Anggaran Rp. 60.489.962.582 dengan realisasi sebesar Rp. **43.347.405.038**, **persentase pencapaian target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan pada umumnya tercapai dalam kategori baik** dimana melebihi pencapaian realisasi persentase keuangan.

Untuk tahun 2022 ini ada penambahan anggaran dana DBH (Dana Reboisasi) sebesar Rp. **17.612.485.700** yang masuk dalam batang tubuh, yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) jumlah dana sebesar Rp 16.976.905.700, sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan sebesar Rp. 200.000.000, sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat berjumlah Rp 400.000.000, dengan

realisasi keuangan masing-masing sebesar Rp 2.847.839.332, Rp 142.964.035, dan Rp 206.082.481 atau sejumlah Rp 3.196.885.848. Beberapa pekerjaan yang tidak terealisasi diantaranya pekerjaan fisik pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau berupa Pemagaran Hutan Kota Berau dan Pembangunan Fisik Ruang Terbuka Hijau di beberapa lokasi seperti eks PDAM Bukit Maritam, Jl. Limunjan (sebelah Posko Karhutla), Jl. Perjuangan Karang Mulyo. Dengan masuknya anggaran DBHDR ke batang tubuh APBD di pertengahan tahun di bulan Juli 2022, dan selesainya masterplan di bulan Desember 2022, sehingga tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pekerjaan fisik, yang mana sebelumnya akan memakan waktu juga dalam proses lelang.

3.4 Realisasi Anggaran

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, pada Anggaran tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 60.489.962.582 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 9.663.864.672

2. Belanja Langsung = Rp. 50.826.097.910

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 9 (Sembilan) Program dan 16 (enam belas) kegiatan serta 38 sub kegiatan, anggaran sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran		Capaian %
		Target	Realisasi	
1	Belanja tidak langsung	9.663.864.672	8.955.598.156	92,67

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2022 dengan rata-rata serapan realisasi keuangan sebesar 92.67 % jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada skala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik.

Belanja langsung

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.306.718.466	8.497.416.144	91,30
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Rp	139.983.500	128.654.455	91,90

	Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	130.000.000	128.654.455	98,96
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	9.983.500	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	270.168.000	252.923.000	93,61
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	270.168.000	252.923.000	93,61
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	114.500.000	111.020.000	96,96
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	114.500.000	111.020.000	96,96
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	634.893.100	588.164.192	92,63
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	16.649.500	14.448.700	86,78
7	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp	196.622.700	186.502.700	94,85
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	54.976.000	52.283.000	91,10
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	32.644.900	21.076.700	64,56
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	4.390.000	87,8
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	329.000.000	309.463.092	94,06
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	632,233,100	141.195.500	22,33
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	Rp	522,585,000	40.659.000	7,78
13	Pengadaan Mebel	Rp	109,648,100	100.536.500	91,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	4,953,970,516	4.768.155.611	96,24
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5,102,200	2.880.000	56,44
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	294.202.800	222.024.486	75,46
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	4.654.665.516	4.571.297.265	98,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.560.970.250	2.504.837.817	97,80
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	2.249.983.150	2.217.576.264	98,55

18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	29.000.000	21.530.000	74,24
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	250.000.000	246.922.553	98,76
20	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	31.987.100	18.809.000	59,80
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	825.500.000	403.503.874	48,87
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp	825.500.000	403.503.874	48,87
21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp	825.500.000	403.503.874	48,87
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.378.102.600	2.178.627.570	91,61
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	695.469.900	655.635.761	92,40
22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp	193.604.600	178.904.900	92,40
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp	229.500.000	207.320.546	90,33
24	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	272.365.300	269.410.315	98,91
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	1.502.808.500	1.380.527.087	91,86
25	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Rp	1.502.808.500	1.380.527.087	91,86
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	179.824.200	142.464.722	92,24
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Rp	179.824.200	142.464.722	79,22
IV	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Rp	23.375.945.560	9.139.396.604	39,09
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp	23.375.945.560	9.139.396.604	39,09

27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	21.832.982.660	7.651.703.282	35,04
28	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp	1.542.962.900	1.487.693.322	96,41
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp	234.362.100	207.376.850	88,48
	<i>Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>	Rp	234.362.100	207.376.850	88,48
29	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp	234.362.100	207.376.850	88,48
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	455.804.100	429.899.172	94,31
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	455.804.100	429.899.172	94,31
30	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp	280.808.500	265.754.072	94,63
31	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	174.995.600	164.145.100	93,79
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	678.809.700	578.010.533	85,15
	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	Rp	678.809.700	578.010.533	85,15
32	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Rp	310.081.600	217.256.161	70,07
33	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp	150.000.000	145.999.707	97,33
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Rp	218.728.100	214.754.665	98,18

VIII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	164.378.900	145.297.850	88,39
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp	164.378.900	145.297.850	88,39
34	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Rp	164.378.900	145.297.850	88,39
IX	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	6.905.566.126	6.325.632.785	91,60
	Pengelolaan Sampah	Rp	13.406.476.484	12.812.278.285	95,56
35	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp	6.634.177.784	6.468.030.852	82,04
36	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp	398.626.600	362.357.495	34,44
37	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Rp	6.373.672.100	5.981.889.938	11,69
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	50.826.097.910	34.391.806.882	67,66

Realisasi belanja langsung pada tahun 2022 dengan rata-rata realisasi fisik kegiatan berkisar 77 % sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 67,66 %, jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi fisik belanja langsung pada skala nilai 60 > 80 kategori penilaian baik sedangkan untuk realisasi keuangan belanja langsung pada skala nilai > 55 kategori penilaian sedang. Secara keseluruhan penilaian sudah dianggap baik karena pada umumnya semua kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau ini disusun masih mengacu pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja instansi Pemerintah.

Pelaksanaan program dan kegiatan OPD DLHK tahun 2022 pada umumnya berjalan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya belum optimal, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut:

1. Beberapa indikator kinerja, masih ada yang sarannya yang belum memenuhi target. Untuk kedepannya akan diupayakan target kinerja dapat tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan.
2. Untuk Indikator Kinerja yang telah dicapai diupayakan akan tetap dipertahankan dalam pelaksanaannya, dan diharapkan lebih meningkat lagi secara kualitas sehingga *outcome* dari program dan kegiatan dapat terwujud.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Clean Government* dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dan dapat di pertanggungjawabkan dan dapat menjadi umpan balik atau terciptanya inovasi bagi *stakeholder* (pihak – pihak yang berkepentingan) yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi masyarakat.

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<i>Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup</i>	90%	92%	92%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten /Kota	<i>Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup</i>	90%	48,88%	48,88%
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	<i>Tersusunnya buku laporan IKPLHD dan RPPLH</i>			
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Terjaganya kualitas lingkungan Hidup</i>	90%	91,61%	91,61%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<i>Terjaganya kualitas lingkungan Hidup</i>	90%	94,27%	94,27%
2	Koordinas, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, udara, dan laut	<i>Jumlah titik/objek yang dipantau</i>	28 perusahaan	28 perusahaan	100%
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	<i>Tersedianya data emisi GRK/tahun</i>	391.466 ton CO ₂ eq	440.918 ton CO ₂ eq	
4	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah data uji</i>	50 dokumen	50 dokumen	100%
	Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<i>Persentase pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup</i>	90%	91,86%	91,86%

5	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<i>Jumlah titik objek monitoring</i>	3 sungai	3 sungai	100%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	90%	79,22%	79,22%
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan</i>	13 kecamatan	10 kecamatan	76,92%
III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau</i>	90%	39,10%	39%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau</i>	90%	39,10%	39%
6	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Terpeliharanya RTH publik di perkotaan</i>	4 lokasi	4 lokasi	100%
7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	<i>Bertambahnya RTH publik yang dibangun dan RTH publik yang direnovasi</i>	4 lokasi	4 lokasi	100%
IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah B3)	<i>Jumlah B3 dan limbah B3 yang tertangani</i>	90%	88,49%	88,49%
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	<i>Tersedianya data penyimpanan sementara limbah B3</i>	90%	88,49%	88,49%
8	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	<i>Tertibnya perizinan limbah B3</i>	20 dokumen	20 dokumen	100%

V	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	90%	94,32%	94,32%
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah usaha yang dibina dan diawasi</i>	90%	94,32%	94,32%
9	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan</i>	100 dokumen	12 dokumen	12%
10	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya penataan lingkungan dan pengawasan ijin pembuangan air limbah</i>	20 kali pembinaan/pengawasan	20 kali pembinaan/pengawasan	100%
VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup</i>	90%	85,15%	85,15%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup</i>	90%	85,15%	85,15%

11	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	<i>Kepedulian masyarakat terhadap kampung iklim</i>	1 kampung	1 kampung	100%
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<i>Jumlah sekolah yang mendapatkan adiwiyata</i>	3 sekolah	3 sekolah	100%
VII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat</i>	90%	88,39%	88,39%
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat</i>	90%	88,39%	88,39%
13	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani</i>	7 pengaduan	7 pengaduan	100%
VIII	Program Pengelolaan Persampahan	<i>Terkelolanya sampah</i>	90%	95,57%	95,57%
	Pengelolaan Sampah	<i>Terkelolanya sampah</i>	90%	95,57%	95,57%
14	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sampah yang terangkut/volume pengangkutan sampah</i>	100%	100%	100%
15	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<i>Lomba kebersihan antar kelurahan</i>	kecamatan	4 kecamatan	100%

16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya prasarana sarana dan operasional pengelolaan persampahan</i>	10 jenis	10 jenis	100%
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	------

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Entri IV

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah Luasan RTH	4 Lahan

Program Kegiatan

Anggaran


1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati

Rp. 809.949.900

Phak Kedua,

Phak Pertama,


H. Sujedi, A.PI
NIP. 19631121 199003 1 004


Mattingas, SE
NIP. 19800202 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang bertanggung jawab di berbagai hal:

Nama : Mattigars, BE

Jabatan : Kepala UPT Perikanan dan Perakairan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sujadi, A.P

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

selaku utusan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang selaras/mesuk sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertanggung jawaban dan kesuksesan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NIP. 59531121 196003 1 004

Mattigars, BE
NIP. 19900202 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pada hasil yang berwujud sebagai di bawah ini:

Nama : Mattigars, BE

Jabatan : Kepala UPT Perencanaan dan Pemukiman

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sugali, A.P

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

selaku utusan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan melaksanakan target kinerja yang selarasnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Ketersediaan dan kesediaan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Juni 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

RIP. 4531121 199003 1 014

Mattigars, BE
RIP. 19900202 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan tatapemerintahan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : H. Abdul Mukti Syarif, ST, M. Si

Jabatan : Kepala UPTD Laboratorium

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sujadi, A.Pi

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. Sujadi, A.Pi
NIP. 19631112 199003 1 004

H. Abdul Mukti Syarif, ST, M. Si
NIP. 19720316 200502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KERBERSIHAN

Eselon IV

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengarsipan surat menyurat	50 Dokumen

Program Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Rp. 179,705,500

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



M. Zulkifli Azhari, SH
NIP. 19700902 199603 1 001



Yusuf Rahmatullah, S.SOS, M.E
NIP. 19880223 201101 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Tujuan rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berwujud target di bawah ini:

Nama Yusuf Rahmatullah, S.Sos.M.E

Jabatan Kepala TU Laboratorium

sebagainya disebut pihak pertama

Nama H. Sukilli Aman, SH

Jabatan Sekretaris DLUH Kab. Berau

sebagai pihak kedua, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selaras/nyambung sesuai dengan peraturan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Ketersediaan dan tanggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari pertanggung jawaban dan tanggung jawab yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. Sukilli Aman, SH
NIP. 19700902 199603 1 001


Yusuf Rahmatullah, S.Sos.M.E
NIP. 19880323 201101 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda target di bawah ini:

Nama : Yusuf Rahmatullah, S.Sos.M.E

Jabatan : Kepala TU Laksanakan

sebagai atasan pihak pertama

Nama : H. Zuhdi Azhari, SH

Jabatan : Sekretaris DUKU-UB Berau

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kelengkapan dan tanggapan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Zuhdi Azhari, SH
NIP. 19700902 199603 1 001

Yusuf Rahmatullah, S.Sos.M.E
NIP. 19880323 201101 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. A.M. Pongoh Tanjung Berau 11117, Kabupaten Berau 78013 Tanjung Berau
Tanjung Berau

Telepon (0511)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis, A.Md

Jabatan : Pengarah Divisi Lingkungan Hidup Berau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Rakhmedi Pasaribu S.H., M.Si

Jabatan : Kabid Pengendalian pencemaran dan Kesehatan lingkungan

selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kelengkapan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian ini dan membantu tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian pengajaran dan saran

Pihak Kedua

Januari 2022

Pihak Pertama

H. Rakhmedi Pasaribu S.H., M.Si
NIP. 19741020 200603 1 003

Muchlis, A.Md
NIP. 19780325 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. A.P. Maram Tanjung 71111 Tenggarong (Pusat) Tenggarong Kalimantan Timur
Tanjung Berau Berau Kalimantan Timur
Berau Pst 71111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka menjabarkan tugas-tugas pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchlis, A.Md

Jabatan : Pengarah Divisi Lingkungan Hidup Berau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Rakhmedi Pasaribu S.Hut. M.Sc

Jabatan : Kabid Pengendalian pencemaran dan Kesehatan lingkungan

diikuti sebagai pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebertanggung-jawaban dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian ini dan membantu tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pelaksanaan dan hasil.

Pihak Kedua

Januari 2022

Pihak Pertama

H. Rakhmedi Pasaribu S.Hut. M.Sc
NIP. 19741020 200003 1 003

Muchlis, A.Md
NIP. 19790325 199003 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Tabel IV

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			2022
1	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Jumlah Perumahan yang dipantau	43 Kecamatan

Program Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar Rp. 99,999,200

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Rahmadi Pasarakan, S.Hut. M.Sc
NIP. 19741020 200003 1 003


Yulianti Indra Sari, ST
NIP. 19790227 200503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon IV

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai	3 Sungai

Program Kegiatan

Anggaran

1. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

Rp. 104.010.850

Phak Kedua,

Phak Pertama,

H. Rahmadi Pasariken, S.Hut, M.Sc
NIP. 19741020 200003 1 003


Mubamad Saherni, S.Hut, M.Sc
NIP. 19730316 2000212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. APT. Pranoto Tanjung Tering 20541 21157, Telukanteh 20542 24679 Tanjung Pabelan
TANJUNGPINANG

Kode Pos 77112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Suharni, S.Hut. M.Sc

Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.Rahmadi Pasarakan S.Hut. M.Sc

Jabatan : Kabid Pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.Rahmadi Pasarakan, S.Hut. M.Sc
NIP. 19741020 200003 1 003


Muhammad Suharni, S.Hut. M.Sc
NIP. 19730316 200212 1 005

**PERJANJIAN KERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Ench III

NO	Program	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Pengendalian pencemaran dan kerusakan LH	Indek pencemaran air	12 Kab

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan pencemaran lingkungan hidup Dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara Dan laut. | Rp. 149,994,600 |
| 2. Pemberian informasi peringatan pencemaran Dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. | Rp. 104,010,850 |
| 3. Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar | Rp. 99,999,300 |

Phak Kedua,

Phak Pertama,


H. Sujadi, A.P.
NIP. 19631121 199003 1 004


H. Rahmedi Pasarokan, S.Hut. M.Sc.
NIP. 19631121 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Rahmadi Pasarakan S.Hut. M.Sc

Jabatan : Kabid Pengendalian pencemaran dan Kerusakan lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sujadi, A.Pi

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. Sujadi, A.Pi

NIP. 19631112 199003 1 004

H. Rahmadi Pasarakan S.Hut M.Sc

NIP. 19741020 200003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon IV

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Peningkatan peranserta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Lambas kebersihan antar Kelurahan dan Pembelian Adipura	4 Kecamatan
2	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terkendalinya pengelolaan limbah B3	20 Dokumen

Program Kegiatan

Anggaran

1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan Rp. 299,999,600 X
2. Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 Rp. 199,609,800

230 juta

Pihak Kedua,



Novar, S, ST

NIP. 19701231 199401 1 001

Pihak Pertama,



M. Rara Pahlevi MC, SH
NIP. 19780728 200801 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. APT. Pranata Telepon (0544) 21157, Faksimili (0544) 26673 Tanjung Redek
TANJUNGPINANG, BERAU Kalimantan Timur Kode Pos 77112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka menegakkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reza Pahlevi MC, SH

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Anwar, S.ST

Jabatan : Kabid Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan LRS

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sefarannya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2023
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Anwar, S.ST
NIP. 19701231 199401 1 001

M. Reza Pahlevi MC, SH
NIP. 19780728 200801 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Endor IV

NO	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
			2022
1	Penyedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di / TPA/TPST/SBA Kabupaten / Kota	Tersedianya sarana prasarana dan operasional pengelolaan persampahan	10 Unit
2	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SBA Kabupaten/kota	Penanganan jaringan drainase permukaan jalan untuk mengurangi genangan air pada kawasan perkotaan	100 %

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Penyedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di / TPA/TPST/SBA Kabupaten /Kota | Rp. 5,315,141,524 |
| 2. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST /SBA Kabupaten/ kota | Rp. 5,911,998,600 |

Pihak Kedua,



Arker, S.ST

NIP. 19701231 199401 1 001

Pihak Pertama,



Helmi, SE

NIP. 19800710 200901 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Enam IV

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Pengelolaan RTH	Terpeliharanya RTH	4 Kecamatan

Program Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan RTH

Rp. 4.213.423,053

Pihak Kedua,



Amir, S, ST
NIP. 19701231 199401 1 001

Pihak Pertama,



Irawati Ahmad Siringer, ST
NIP. 19780618 200502 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwadi Ahmadi Singgar,ST

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Mada

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Anwar,S.ST

Jabatan : Kabid Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan L33

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Anwar, S. ST
NIP. 19701231 199401 1 001

Pihak Pertama,

Irwadi Ahmadi Singgar,ST
NIP. 19780618 200502 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Tabel III

No	Program	Indikator kinerja	Target
			2023
1	Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	Tertakutannya penutaman dan pemeliharaan RTH	4 Kecamatan
2	Pengendalian bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali	10 Dokumen
3	Pengelolaan Persampahan	Persentase cakupan pelayanan/persentase sampah yang tertangani (persen)	90 %

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Rp. 4,213,423,052 |
| 2. Pengelolaan sarana dan prasarana keaneka Ragaman hayati | Rp. 809,949,900 |
| 3. Verifikasi lapangan untuk memastikan Penuhuan persyaratan administrasi dan teknis Penyimpanan sementara limbah B3 | Rp. 199,609,800 |
| 4. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan Pengumpulan, pengangkutan, pengolahan Dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST | Rp. 5,315,141,524 |
| 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan | Rp. 299,999,600 |
| 6. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota | Rp. 5,911,998,600 |

Pihak Kedua,


I. Sujadi, A.P.

NIP. 19631121 199003 1 004

Pihak Pertama,


A. S. ST

NIP. 19701231 199401 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang tertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar, S.ST

Jabatan : Kabid Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan LBS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sujadi, A.P

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. Sujadi, A.P

NIP. 19631112 199003 1 004



Anwar, S.ST

NIP. 19701231 199401 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon IV

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang LH untuk lembaga kemasyarakatan	Kepekaan masyarakat terhadap lingkungan hidup	1 Kampung
2	Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mendapat Adiwiyata	3 Event ✓

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang LH untuk lembaga kemasyarakatan | Rp. 116,793,600 |
| 2. Pendampingan gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Rp. 150,000,000 |

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Masmanur, ST, M. Si

NIP. 19690615 200012 1 004


Sri Utami Wardani, ST

NIP. 19791203 200901 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

B. APT. Puspa Laksana (P/14) 21137, Laksana (P/14) 20471 Tanjung Berau
Lalauha, Berau

File No. 1111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka menegakkan motto pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Utami Wardani, ST

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Masmansur, ST, M. Si

Jabatan : Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

selaki atanan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Masmansur, ST, M. Si
NIP. 19690615 200012 1 004

Sri Utami Wardani, ST
NIP. 19791203 200901 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon IV

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
			2022
1	Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang lain lingkungan hidup, lain PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Meningkatnya pemataan lingkungan dan Pengawasan Ujin pembuangan air limbah	10 Pembinaan/Pengawasan

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang lain lingkungan hidup, lain PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota | Rp. 149,995,600 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Masmansur, ST, M. Si
NIP. 19690615 200012 1 004

Jusran Ardi, SH
NIP. 19740510 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. APL. Rantau Tekong (P.O.) 71117, Lingsih (P.O.) 76471 Tanjung Berau
Kabupaten Berau

Hal: Per. 1111

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang tertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Utami Wardani, ST

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Maemansur, ST, M. Si

Jabatan : Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

selaki atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Maemansur, ST, M. Si
NIP. 19690615 200012 1 004

Sri Utami Wardani, ST
NIP. 19791203 200901 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Enam IV

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	bertanggungnya dengan basis permukiman dan perumahan LH	10 Pengaduan

Program Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Rp. 119,929,900

Plhak Kedua,

Plhak Pertama,


Masmansur, ST, M, Si
NIP. 19690615 200612 1 004


M. Teddy Palapa, S. Hut
NIP. 19771221 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Enam IV

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	bertanggungnya dengan basis pemukiman dan perumahan LH.	10 Pengaduan

Program Kegiatan

Anggaran

1. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

Rp. 119,929,900

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Masmansur, ST, M, Si
NIP. 19690615 200612 1 004


M. Teddy Palapa, S. Hut
NIP. 19771221 200212 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

R. APT. Prasno Telepon (0564) 21151, Faksimili (0564) 21671, Tempat Kerja
TANJUNG BIDEK

Esok Pagi 77112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.Teddy Palapa, S.Hut.

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Masmansur, ST, M.Si

Jabatan : Kabid Perataan dan Peningkatan Kapasitas LH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Masmansur, ST, M.Si
NIP. 19690615 200012 1 004

M.Teddy Palapa, S.Hut
NIP. 1977121 200212 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masmansur, ST, M. Si

Jabatan : Kabid Perataan dan Peningkatan Kapasitas LH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sajadi, A. Pi

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. Sajadi, A. Pi

NIP. 19631112 199003 1 004


Masmansur, ST, M. Si

NIP. 19690615 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masmansur, ST, M. Si

Jabatan : Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sajadi, A. Pi

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


H. Sajadi, A. Pi

NIP. 19631112 199003 1 004


Masmansur, ST, M. Si

NIP. 19690615 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta terlaksananya pada level yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Astuty Hubsanda, A.Md

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Mula

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Bambang Suharto, S.Hut. M.Sc

Jabatan : Kabid Tata Lingkungan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Agus Bambang Suharto, S.Hut. M.Sc
NIP. 19710801 200003 1 005

Pihak Pertama,

Yuni Astuty Hubsanda, A.Md
NIP. 19780615 200012 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DI RAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEHATAN

Tabel IV

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Facilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	100 dokumen

Program Kegiatan

Anggaran

1. **Facilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH** **Rp. 200,000,000**

Pihak Kedua,



Agus Bambang Suharto, S.Hut, M.Sc
NIP. 19631121 199003 1 004

Pihak Pertama,



Irena Anjika, S.Hut
NIP. 19750425 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KESEHATAN

Tabel IV

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	100 dokumen

Program Kegiatan

Anggaran

1. Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH

Rp. 200.000.000

Pihak Kedua,



Agus Bambang Suharto, S.Hut, M.Sc
NIP. 19631121 199003 1 004

Pihak Pertama,



Irena Aninda, S.Hut
NIP. 19760425 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon IV

NO	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
			2022
1	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRRK), mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Data emisi gas rumah kaca berbasis lahan	391,446 ton

Program Kegiatan

Anggaran

1. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRRK), mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Rp. 200,000,000

Pihak Kedua,



Agus Bambang Suharto, S.Hut.M.Sc
NIP. 19631121 199003 1 004

Pihak Pertama,



Ibrahim Nur, S.ST
NIP. 19690505 199103 1 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang terdapat lampiran di bawah ini:

Nama : Ibrahim Nur, S.ST

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Mada

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Bambang Suharto, S.Hut, M.Sc

Jabatan : Kabid Tata Lingkungan

seleksi atasannya pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Agus Bambang Suharto, S.Hut, M.Sc
NIP. 19710901 200003 1 006

Pihak Pertama,

Ibrahim Nur, S.ST
NIP. 19690505 199103 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KERBERSIHAN**

Tabel III

NO	Program	Indikator Kinerja	Target
			2022
1	Facilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	100 Dokumen
2	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Tersedianya data emisi GRK Tahun	142.941 Tm
3	Penyusunan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang	Identifikasi dilakukan dengan melihat irisan antara indikator TPI dengan indikator kinerja urusan yang dituangkan dalam lampiran Permendagri No tahun 2017	1 Dokumen

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Rp. 694.000.000 |
| 2. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Pengendalian Emisi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Rp. 200.000.000 |
| 3. Facilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan / atau izin PPLH | Rp. 200.000.000 |

Pihak Kedua,


A. Sujadi, A.P
NIP. 19631121 199003 1 004

Pihak Pertama,


Agus Bambang Subarto, S.Hut.M.Sc
NIP. 19631121 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

R. APT. H. Aji Satrio Tanjung (0209121157, Kabupaten Berau) (0204) 06071 Tanjung Berau
TAMBAH BERSIH

Halte Pda. 77112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan lingkungan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan peran hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Bambang Scharito, S.Hut, M.Sc

Jabatan : Kabid Tata Lingkungan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sujadi, A.Pi

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberthasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Sujadi, A.Pi

NIP. 19631112 199003 1 004

Agus Bambang Scharito, S.Hut, M.Sc

NIP. 19631121 199003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eselon IV

No	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
			2022
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya program lingkungan hidup dan kebersihan	1 dokumen
2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terselenggaranya PLH	2 Even

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rp. 100.000.000 |
| 2. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan | Rp. 150.000.000 |

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Zulkifli Azhari, SH
NIP. 19700903 199603 1 001


Hj. Leni Zakiah, S.Pi
NIP. 19720619 199803 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj Leni Zakiah, S.Pi

Jabatan : Perencana Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zulkifli Ashari, SH

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Zulkifli Ashari, SH
NIP. 19700902 199602 1 001


Hj Leni Zakiah, S.Pi
NIP. 19730619 199803 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Eskalor IV

NO	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
			2022
1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis

Program Kegiatan

Anggaran

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Rp. 104,997,000

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Zulkifli Ashari, SH
NIP. 19700902 199603 1 001


Hj. Ita Rostika, SE
NIP. 19631223 199303 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. APT. Prokosta Tolong (D5M4) 71117, Telp: (0546) 21631 Tanjung Berau

TANGUNG BERAU

Kode Pos: 77312

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Ita Rustika, SE

Jabatan : Kasabag Urusan dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Zulkifli Ashari, SH

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Zulkifli Ashari, SH
NIP. 19700902 199603 1 001

Hj. Ita Rustika, SE
NIP. 19631223 199303 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. RPT. Proklamasi Telukempas (D5541) 21117, Kabupaten Berau 76540-204 PE Tanjung Berau

TAMBUK HEDIR

Kelemb. Pim. 77312

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Ita Rustika, SE

Jabatan : Kasubag Urusan dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Zulkifli Ahari, SH

Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Zulkifli Ahari, SH
NIP. 19700902 199603 1 001

Hj. Ita Rustika, SE

NIP. 19631223 199303 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jl. APT. Pranoto Telepon (0541) 21157, Faksimile (0541) 26071 Tanjung Berau
TANJUNG BERAU

Poskod: 77112

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pelita Hati, SE
Jabatan : Kasubag Keuangan Dan Aset

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Zulkifli Ashari, SH
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Zulkifli Ashari, SH
NIP. 19700902 199603 1 001


Pelita Hati, SE
NIP. 19690907 199303 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Enam (6)

No	Program	Indikator Kinerja	Target
			2022
1	Pemangjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Prosentase nilai kerja internal yang terlayani dengan baik	98 %

Program Kegiatan

Anggaran

- | | |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah | Rp. 100,000,000 |
| 2. Sosialisasi peraturan perundang undangan | Rp. 5,000,000 |

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Sojadi, A.P
NIP. 19631121 199003 1 004

Zulkifli Azhari,SH
NIP. 19700902 199603 001



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

B. APT. Prinsip Berencana (BPR) & IPK, Pelaksanaan (PPL) & M&E (M&E) Tingkat Rendah
LAMPUNG, 01/01/2022

Hal: Per. 01/2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang tertuang dalam di bawah ini:

Nama : H. Zulkibli Ashari, SH

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Sujadi, A.P

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka memenuhi target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Sujadi, A.P
NIP. 19631112 199003 1 004

H. Zulkibli Ashari, SH
NIP. 19700902 199003 1 001

Program

Anggaran

1. PERBIJAKAN BIDANG PEMERINTAHAN BARANG KAWAPAYUNGOTA	Rp.	75.000.000.000
2. PERBIJAKAN LINGKUNGAN BUDAYA	Rp.	1.000.000.000
3. PERBIJAKAN PERKAWASAN DAN/ATAU KAWASAN LINGKUNGAN BUDAYA	Rp.	500.000.000
4. PERBIJAKAN KEARIFANBUDAYA BUDAYA BUDAYA	Rp.	500.000.000
5. PERBIJAKAN BIDANG BERKAWASAN DAN KAWASAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN BUDAYA DAN KAWASAN BUDAYA DAN KAWASAN BUDAYA	Rp.	500.000.000
6. PERBIJAKAN DAN KAWASAN BUDAYA DAN KAWASAN BUDAYA DAN KAWASAN BUDAYA DAN KAWASAN BUDAYA	Rp.	500.000.000
7. PERBIJAKAN PERKAWASAN, PELAYANAN DAN PERKAWASAN LINGKUNGAN BUDAYA DAN KAWASAN BUDAYA	Rp.	1.100.000.000
8. PERBIJAKAN PERKAWASAN LINGKUNGAN BUDAYA	Rp.	1.000.000.000
9. PERBIJAKAN PERKAWASAN	Rp.	5.000.000.000

Mbak Kerting

H. SRI DJARSIH MAS, M.Pd

Mbak Perizani,

H. SUJADI, A.Pd
NIP. 19631121 199003 1 004

Program

Anggaran

1. TERBUKANNI BUKAN PERMINTAAN BARANG KAPITABILISASI	Rp	75.000.000.000
2. PERBUKANNI LINGKUNGAN BUKAN	Rp	1.000.000.000
3. PERBUKANNI PERBUKANNI DAN/ATAU PERBUKANNI LINGKUNGAN BUKAN	Rp	500.000.000
4. PERBUKANNI PERBUKANNI DAN/ATAU PERBUKANNI LINGKUNGAN BUKAN	Rp	500.000.000
5. PERBUKANNI BUKAN PERBUKANNI DAN/ATAU PERBUKANNI LINGKUNGAN BUKAN	Rp	500.000.000
6. PERBUKANNI DAN/ATAU PERBUKANNI PERBUKANNI DAN/ATAU PERBUKANNI LINGKUNGAN BUKAN	Rp	500.000.000
7. PERBUKANNI PERBUKANNI, PERBUKANNI DAN/ATAU PERBUKANNI LINGKUNGAN BUKAN	Rp	1.100.000.000
8. PERBUKANNI PERBUKANNI LINGKUNGAN BUKAN	Rp	1.000.000.000
9. PERBUKANNI PERBUKANNI	Rp	5.000.000.000

Plhak Kerdig

H. SRI DJARSIH MAS, N.Pd

Plhak Perizmit

H. SUJADI, A.Pd
NIP. 19631121 199003 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Sujadi, A.P.

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. Sri Juniarah Mas, M.Pd

Jabatan : Bupati Berau

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari 2022

Pihak Kedua

H. SRI JUNIARAH MAS, M.Pd

Pihak Pertama

H. SUJADI, A.P.
NIP. 19631121 199003 1004

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	<i>Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup</i>	90%
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya perencanaan lingkungan hidup</i>	90%
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	<i>Tersusunnya buku laporan IKPLHD dan RPPLH</i>	
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	<i>Terjaganya kualitas lingkungan Hidup</i>	90%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	<i>Terjaganya kualitas lingkungan Hidup</i>	90%
	Koordinas, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, udara, dan laut	<i>Jumlah titik/objek yang dipantau</i>	28 perusahaan
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	<i>Tersedianya data emisi GRK/tahun</i>	391.466 ton CO ₂ eq
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah data uji</i>	50 dokumen
	Penanggulangan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<i>Persentase pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup</i>	90%
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<i>Jumlah titik objek monitoring</i>	3 sungai
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</i>	90%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	<i>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan</i>	13 kecamatan

III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau</i>	90%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau</i>	90%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<i>Terpeliharanya RTH publik di perkotaan</i>	4 lokasi
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	<i>Bertambahnya RTH publik yang dibangun dan RTH publik yang direnovasi</i>	4 lokasi
IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah B3)	<i>Jumlah B3 dan limbah B3 yang tertangani</i>	90%
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	<i>Tersedianya data penyimpanan sementara limbah B3</i>	90%
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	<i>Tertibnya perizinan limbah B3</i>	20 dokumen
V	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</i>	90%
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah usaha yang dibina dan diawasi</i>	90%
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan</i>	100 dokumen
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya penataan lingkungan dan pengawasan ijin pembuangan air limbah</i>	35 pelaku usaha

VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup</i>	90%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	<i>Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup</i>	90%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	<i>Kepedulian masyarakat terhadap kampung iklim</i>	1 kampung
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	<i>Jumlah sekolah yang mendapatkan adiwiyata</i>	3 sekolah
VII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat</i>	90%
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat</i>	90%
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani</i>	7 pengaduan
VIII	Program Pengelolaan Persampahan	<i>Terkelolanya sampah</i>	90%
	Pengelolaan Sampah	<i>Terkelolanya sampah</i>	90%
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sampah yang terangkut/volume pengangkutan sampah</i>	73%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<i>Lomba kebersihan antar kelurahan</i>	4 kecamatan
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya prasarana sarana dan operasional pengelolaan persampahan</i>	10 jenis

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Berau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup		Indek kualitas lingkungan hidup						
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	78,63	78,73	78,83	78,93	79,03	79,13
		Terjaganya kualitas air sungai	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	56,29	56,39	56,49	56,59	56,69	56,79
		Terjaganya kualitas udara	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	85,97	86,07	86,17	86,27	86,37	86,47
		Meningkatnya Tutupan Lahan	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,789	89,889	89,989	90,089	90,189	90,289
		Menurunnya intensitas emisi GRK	Jumlah Emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan	406.000	391.466	379.179	366.998	354.906	342.901
		Tertibnya pengawasan terhadap izin lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20 kali pembinaan/pengawasan	20 kali pembinaan/pengawasan	20 kali pembinaan/pengawasan	20 kali pembinaan/pengawasan	20 kali pembinaan/pengawasan	20 kali pembinaan/pengawasan
		Tertanganinya pengaduan masyarakat terhadap izin lingkungan hidup	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan	7 pengaduan
		Meningkatnya taman dan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi
2	Meningkatkan Pengolahan persampahan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah		Persentase jumlah sampah yang tertangani						
		Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Persentase jumlah sampah yang tertangani	74%	73%	72%	71%	70%	69%

2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah		90%	6,010,586,371	90%	6,010,586,371	90%	6,311,115,689	90%	6,621,971,472	90%	6,953,070,044	90%	7,300,600,000	90%	39,207,929,947	DLHK	Kab. Berau			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	12 Bulan	5,911,067,371	12 Bulan	5,911,067,371	12 Bulan	6,206,620,739	12 Bulan	6,516,951,775	12 Bulan	6,842,799,363	12 Bulan	7,184,900,000	12 Bulan	38,573,406,619	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya honor pengelola keuangan	12 orang	12 Orang	99,519,000	12 Orang	99,519,000	12 Orang	104,494,950	12 Orang	105,019,697	12 Orang	110,270,681	12 Orang	115,700,000	12 Orang	634,523,328	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah			65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan pakain dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya			65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	125 Stel	65,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		90%	385,189,200	90%	385,189,200	90%	404,448,660	90%	424,671,092	90%	445,889,002	90%	466,550,000	90%	2,511,937,154	DLHK	Kab. Berau			
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronika	4 jenis	2 Jenis	9,914,000	2 Jenis	9,914,000	2 Jenis	10,409,700	2 Jenis	10,930,185	2 Jenis	11,476,694	2 Jenis	12,000,000	2 Jenis	64,644,579	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	10 Jenis	114,992,600	10 Jenis	114,992,600	10 Jenis	120,742,230	10 Jenis	126,779,341	10 Jenis	133,118,308	10 Jenis	139,650,000	10 Jenis	750,275,079	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	108 porsi	108 Porsi	41,477,000	994 Porsi	41,477,000	1043 Porsi	43,550,850	1043 Porsi	45,728,392	1123 Porsi	48,000,000	1123 Porsi	50,000,000	1123 Porsi	270,233,242	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	11 jenis	10 Jenis	13,805,600	10 Jenis	13,805,600	10 Jenis	14,495,880	10 Jenis	15,220,674	10 Jenis	15,981,000	10 Jenis	16,500,000	10 Jenis	89,808,754	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan majalah	5 Majalah	5 Majalah	5,000,000	5 Exemplar	5,000,000	5 Exemplar	5,250,000	5 Exemplar	5,512,500	5 Exemplar	5,788,000	5 Exemplar	5,900,000	5 Exemplar	32,450,500	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya belanja perjalanan dinas luar dan dalam daerah	88 kali	88 kali	200,000,000	88 kali	200,000,000	88 kali	210,000,000	88 kali	220,500,000	88 kali	231,525,000	88 kali	242,500,000	88 kali	1,304,525,000	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang untuk menunjang urusan pemerintah			90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel			90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	6 Jenis	90,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan		90%	3,988,440,408	90%	3,988,440,408	90%	4,187,862,428	90%	4,397,230,121	90%	4,617,012,000	90%	4,846,800,000	90%	26,025,785,365	DLHK	Kab. Berau			
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	1,410	1000 Surat	4,992,400	1000 Surat	4,992,400	1000 Surat	5,242,020	1000 Surat	5,504,121	1000 Surat	5,700,000	1000 Surat	5,900,000	1000 Surat	32,330,941	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	2 Jenis	4 Jenis	250,000,000	4 Jenis	250,000,000	4 Jenis	262,500,000	4 Jenis	275,600,000	4 Jenis	289,380,000	4 Jenis	303,000,000	4 Jenis	1,630,480,000	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor pegawai tidak tetap	118 orang	118 Orang	3,733,448,008	118 Orang	3,733,448,008	118 Orang	3,920,120,408	118 Orang	4,116,126,000	118 Orang	4,321,932,000	118 Orang	4,537,900,000	118 Orang	24,362,974,424	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan lingkungan hidup dan kebersihan		90%	1,470,913,600	90%	1,470,913,600	90%	1,544,458,380	90%	1,621,646,500	90%	1,702,579,000	90%	1,784,600,000	90%	9,595,111,080	DLHK	Kab. Berau			
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas	1 Tahun	12 Bulan	1,399,917,600	30 Jenis	1,399,917,600	30 Jenis	1,469,913,480	30 Jenis	1,543,409,000	30 Jenis	1,620,579,000	30 Jenis	1,701,600,000	30 Jenis	9,135,336,680	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	30 unit	12 Bulan	15,000,000	30 Jenis	15,000,000	30 Jenis	15,750,000	30 Jenis	16,537,500	30 Jenis	17,300,000	30 Jenis	18,000,000	30 Jenis	97,587,500	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan gedung kantor	2 unit	12 Bulan	49,998,000	12 Bulan	49,998,000	12 Bulan	52,497,000	12 Bulan	55,100,000	12 Bulan	57,800,000	12 Bulan	57,800,000	12 Bulan	323,193,000	DLHK	Kab. Berau		
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa / peralatan kebersihan	1 Tahun	6 unit	5,998,000	6 unit	5,998,000	6 unit	6,297,900	6 unit	6,600,000	6 unit	6,900,000	6 unit	7,200,000	6 unit	38,993,900	DLHK	Kab. Berau		

2	11	02				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	2,38%	90%	300,000,000	90%	300,000,000	90%	315,000,000	90%	330,000,000	90%	345,000,000	90%	360,000,000	90%	1,950,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	02	2			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	2,38%	90%	300,000,000	90%	300,000,000	90%	315,000,000	90%	330,000,000	90%	345,000,000	90%	360,000,000	90%	1,950,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	02	2.01	01		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		2 Dokumen	300,000,000										1 Dokumen	300,000,000	DLHK	Kab. Berau		
2	11	02	2.02	01		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyusunan KLHS RDTR			1 dokumen	300,000,000	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	345,000,000	1 Dokumen	360,000,000	1 Dokumen	360,000,000	1 Dokumen	1,650,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	03				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	2,38%	90%	514,506,735	90%	994,999,150	90%	1,071,700,000	90%	1,149,025,000	90%	1,236,886,250	90%	1,285,395,562	90%	6,093,627,647	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	2,38%	90%	514,506,735	90%	994,999,150	90%	1,071,700,000	90%	1,149,025,000	90%	1,236,886,250	90%	1,285,395,562	90%	6,093,627,647	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah titik / objek yg dipantau	28	28	89,999,750	28	120,000,000	28	134,000,000	28	152,000,000	28	165,000,000	28	176,395,562	28	837,395,312	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.01	02		Koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan iklim	Tersedianya Data Emisi GRK/Tahun	362.715 ton Co2 eq	406.000 ton CO2 eq	84,999,650	391.466 ton CO2 eq	134,999,150	379.179 ton CO2 eq	145,000,000	366.998 ton CO2 eq	155,000,000	354.906 ton CO2 eq	170,886,250	342.901 ton CO2 eq	178,000,000	7 Juta ton CO2 eq /5 Tahun	710,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.01	03		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah data uji	50 Dokumen	50 Dokumen	144,507,635	50 Dokumen	140,000,000	50 Dokumen	142,000,000	50 Dokumen	155,000,000	50 Dokumen	170,000,000	50 Dokumen	178,000,000	50 Dokumen	929,507,635	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.02	01		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran	Jumlah titik objek monitoring	3 Sungai	3 Sungai	119,999,900	3 Sungai	100,000,000	3 Sungai	130,700,000	3 Sungai	147,025,000	3 Sungai	168,000,000	3 Sungai	178,000,000	3 Sungai	843,724,900	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.02	02		Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik area yg dipantau/monitoring				20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	500,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.02	03		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik area yg dipantau/monitoring				20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	100,000,000	20 Perusahaan	500,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.03	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan				13 Kali	100,000,000	13 Kali	100,000,000	13 Kali	100,000,000	13 Kali	100,000,000	13 Kali	100,000,000	13 Kali	500,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.03	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	74,999,800	13 Kali	100,000,000	13 Kali	120,000,000	13 Kali	140,000,000	13 Kali	163,000,000	13 Kali	175,000,000	13 Kali	772,999,800	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.03	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan				4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	500,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	03	2.03	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan					1,071,700,000		1,149,025,000		1,236,886,250		1,285,395,562							
2	11	03	2.03	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan																		
											994,999,150		1,071,700,000												
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau		90%	4,889,125,740	90%	4,889,125,740	90%	5,133,500,000	90%	5,389,000,000	90%	5,658,000,000	90%	5,939,500,000	90%	31,898,251,480	DLHK	Kab. Berau	
2	11	04	2.01			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau		90%	4,889,125,740	90%	4,889,125,740	90%	5,133,500,000	90%	5,389,000,000	90%	5,658,000,000	90%	5,939,500,000	90%	31,898,251,480	DLHK	Kab. Berau	
2	11	04	2.01	04		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan, sarana dan prasarana Keaneekaragaman	Terpeliharanya RTH Publik di perkotaan	4 Lokasi	4 Lokasi	4,379,125,740	4 Lokasi	4,379,125,740	4 Lokasi	4,598,000,000	4 Lokasi	4,827,000,000	4 Lokasi	5,068,000,000	4 Lokasi	5,320,000,000	4 Lokasi	28,571,251,480	DLHK	Kab. Berau	
2	11	04	2.01	07		Pengelolaan sarana dan prasarana Keaneekaragaman	Terpeliharanya RTH Publik yang dibangun dan RTH Publik yang	4 Lokasi	4 Lokasi	510,000,000	4 Lokasi	510,000,000	4 Lokasi	535,500,000	4 Lokasi	562,000,000	4 Lokasi	590,000,000	4 Lokasi	619,500,000	4 Lokasi	3,327,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	05				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	2,38%	90%	74,993,000	90%	74,993,000	90%	78,700,000	90%	82,600,000	90%	86,700,000	90%	91,000,000	90%	488,986,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	05	2.01			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tersedianya data penyimpanan sementara limbah B3	2,38%	90%	74,993,000	90%	74,993,000	90%	78,700,000	90%	82,600,000	90%	86,700,000	90%	91,000,000	90%	488,986,000	DLHK	Kab. Berau	

2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tertibnya perizinan limbah B3	20 Dokumen	20 Dokumen	74,993,000	20 Dokumen	74,993,000	20 Dokumen	78,700,000	20 Dokumen	82,600,000	20 Dokumen	86,700,000	20 Dokumen	91,000,000	20 Dokumen	488,986,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	2,38%	90%	179,999,900	90%	179,999,999	90%	189,000,000	90%	198,200,000	90%	208,110,000	90%	218,240,500	90%	1,173,550,300	DLHK	Kab. Berau
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yg dibina dan diawasi	2,38%	90%	179,999,900	90%	179,999,999	90%	189,000,000	90%	198,200,000	90%	208,110,000	90%	218,240,500	90%	1,173,550,300	DLHK	Kab. Berau
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi yg diterbitkan	100 Dokumen	100 Dokumen	80,000,000	100 Dokumen	80,000,000	100 Dokumen	84,000,000	100 Dokumen	88,000,000	100 Dokumen	94,000,000	100 Dokumen	100,000,000	100 Dokumen	526,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yg dibina dan diawasi	17 Pelaku Usaha	20 kali pembinaan/ pengawasan	99,999,900	20 kali pembinaan/ pengawasan	99,999,900	20 kali pembinaan/ pengawasan	105,000,000	20 kali pembinaan/ pengawasan	110,200,000	20 kali pembinaan/ pengawasan	114,110,000	20 kali pembinaan/ pengawasan	118,240,500	20 kali pembinaan/ pengawasan	647,550,300	DLHK	Kab. Berau
2	11	07	2.07	09	PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYRAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Tersedianya data dan informasi keberadaan MHA dan terlaksananya pemberdayaan serta penguatan kelembagaan MHA		90%	150,000,000	90%	200,000,000	90%	250,000,000	90%	300,000,000	90%	350,000,000	90%	350,000,000	90%	1,450,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	07	2.07	09	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Tersedianya data dan informasi keberadaan MHA dan terlaksananya pemberdayaan serta penguatan kelembagaan MHA		90%	150,000,000	90%	200,000,000	90%	250,000,000	90%	300,000,000	90%	350,000,000	90%	350,000,000	90%	1,450,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	07	2.07	09	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait PPLH	Tersedianya data dan informasi keberadaan MHA dan terlaksananya pemberdayaan serta penguatan kelembagaan MHA	1 kampung		150,000,000	1 kampung	200,000,000	1 kampung	250,000,000	1 kampung	300,000,000	1 kampung	350,000,000	1 kampung	350,000,000	1 kampung	1,450,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	2,38%	90%	194,875,600	90%	194,875,600	90%	204,619,670	90%	214,652,003	90%	225,234,600	90%	235,996,330	90%	1,270,253,803	DLHK	Kab. Berau
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	2,38%	90%	194,875,600	90%	194,875,600	90%	204,619,670	90%	214,652,003	90%	225,234,600	90%	235,996,330	90%	1,270,253,803	DLHK	Kab. Berau
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kepedulian masyarakat terhadap kampung iklim	1 Kampung	1 Kampung	64,990,550	1 Kampung	64,990,550	1 Kampung	67,990,550	1 Kampung	70,990,550	1 Kampung	74,990,550	1 Kampung	77,990,550	1 Kampung	421,943,300	DLHK	Kab. Berau
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup sedunia	2 Even	2 Even	59,885,400	2 Even	59,885,400	2 Even	63,629,470	2 Even	67,661,803	2 Even	71,244,400	2 Even	75,450,260	2 Even	397,756,733	DLHK	Kab. Berau
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah sekolah mendapatkan adiwiyata	3 Sekolah	3 Sekolah	69,999,650	3 Sekolah	69,999,650	3 Sekolah	72,999,650	3 Sekolah	75,999,650	3 Sekolah	78,999,650	3 Sekolah	82,555,520	3 Sekolah	450,553,770	DLHK	Kab. Berau
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		90%	150,000,000	90%	200,000,000	90%	250,000,000	90%	300,000,000	90%	350,000,000	90%	350,000,000	90%	1,450,000,000	DLHK	Kab. Berau

2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		90%	150,000,000	90%	200,000,000	90%	250,000,000	90%	300,000,000	90%	350,000,000	90%	350,000,000	90%	1,450,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	4 kecamatan	150,000,000	4 kecamatan	200,000,000	4 kecamatan	250,000,000	4 kecamatan	300,000,000	4 kecamatan	350,000,000	4 kecamatan	350,000,000	4 kecamatan	1,450,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat	2,38%	90%	74,978,500	90%	74,978,500	90%	78,727,425	90%	82,663,796	90%	86,796,985	90%	91,136,834	90%	489.282.004	DLHK	Kab. Berau
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat	2,38%	90%	74,978,500	90%	74,978,500	90%	78,727,425	90%	82,663,796	90%	86,796,985	90%	91,136,834	90%	489.282.004	DLHK	Kab. Berau
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yg ditangani	5 kasus	7 Pengaduan	74,978,500	7 Pengaduan	74,978,500	7 Pengaduan	78,727,425	7 Pengaduan	82,663,796	7 Pengaduan	86,796,985	7 Pengaduan	91,136,834	7 Pengaduan	489,282,040	DLHK	Kab. Berau
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terkelolanya sampah	97,58%	90%	7,143,520,646	90%	6,983,520,646	90%	7,860,000,000	90%	8,320,500,000	90%	9,031,500,000	90%	9,043,000,000	90%	48,382,041,292	DLHK	Kab. Berau
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terkelolanya sampah	97,58%	90%	7,143,520,646	90%	6,983,520,646	90%	7,860,000,000	90%	8,320,500,000	90%	9,031,500,000	90%	9,043,000,000	90%	47,998,520,646	DLHK	Kab. Berau
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen JAKSTRADA Pengelolaan Sampah								1 Dok/Perbup	250,000,000			1 Dok/Perbup	250,000,000			DLHK	Kab. Berau
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan	Meningkatnya Persentase Pengurangan Sampah Melalui 3R					27%	220,000,000	28%	230,000,000	30%	240,000,000	30%	250,000,000	30%	940,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yg terangkut / volume pengangkutan sampah	74%	74%	5,610,042,496	73%	5,700,000,000	72%	6,000,000,000	71%	6,280,000,000	70%	6,450,000,000	69%	6,553,000,000	69%	36,593,042,496	DLHK	Kab. Berau
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya lomba kebersihan antar RT dan Terlaksananya penilaian adipura	4 kecamatan	4 Kecamatan	200,000,000	4 Kecamatan	250,000,000	4 Kecamatan	300,000,000	4 Kecamatan	350,000,000	4 Kecamatan	400,000,000	4 Kecamatan	430,000,000	4 Kecamatan	1,930,000,000	DLHK	Kab. Berau
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antar Instansi dan Lembaga					1 dokumen	175,000,000	1 Dokumen	200,500,000	1 Dokumen	250,500,000	1 Dokumen	260,000,000	1 Dokumen	886,000,000	DLHK	Kab. Berau	
2	11	11	2.01	06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Tersedianya prasarana dan sarana operasional pengelolaan persampahan	17 jenis	10 Jenis	983,478,150	10 Jenis	1,000,000,000	10 Jenis	1,165,000,000	10 Jenis	1,260,000,000	10 Jenis	1,441,000,000	10 Jenis	1,550,000,000	10 Jenis	7,399,478,150	DLHK	Kab. Berau
								6,793,520,646		6,950,000,000		7,860,000,000		8,320,500,000		9,031,500,000		9,043,000,000					

RENCANA AKSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BRAU TAHUN 2022

No.	Sasaran Strategis						Program			Kegiatan						Rp.	Ket.			
	Uraian	Indikator Sasaran Strategis	Target Pentahapan				Uraian	Indikator Program	Target Pentahapan	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan		Target Pentahapan						
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV						Target	Satuan	Tw I	Tw II			Tw III	Tw IV	
1.	Peningkatan Kinerja Aparatur	terlaksananya kinerja aparatur	25	25	25	15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	90%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen program dan kegiatan LH dan Kebersihan	2	Dokumen	1					74,916,900	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja OPD	2	Dokumen	1					9,953,600	
										Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Tersediannya honor pengelolaan keuangan	12	Orang	12					99,519,000	
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya pekan Lingkungan Hidup	2	Event		2				59,885,400	
										Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya peralatan listrik dan elektronika	2	Jenis	2					9,914,000	
										Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	1	Paket	1					114,992,600	
										Penyediaan bahan logistik kantor	Tersediannya makan dan minum rapat	994	Porsi	200	300	300	194		41,477,000	
										Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetak dan penggandaan	10	Jenis	3	4	3			13,805,600	
										Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya surat kabar dan majalah	5	Majalah	5					5,000,000	
										Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersediannya belanja perjalanan dinas luar daerah	25	Kali	5	10	5	5		200,000,000	
										Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat	1000	Surat	250	250	250	250		4,992,400	
										Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4	Jenis	4					250,000,000	
										Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya honor PTT	118	Orang	118					3,733,448,008	

										Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas /operasional atau lapangan	Tersedianya biaya operasional dan perawatan kendaraan dinas	30	Unit	5	10	10	5	1,399,917,600	
										Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	30	Unit	5	10	10	5	15,000,000	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terjaganya gedung kantor	4	Unit			4		49,998,000	
										Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya jasa kebersihan	5	Buah	5				5,998,000	
Meningkatnya pelaku usaha yang mempunyai dokumen lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	100					Program perencanaan lingkungan hidup	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	90%	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	0	0	0				-	
										Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyusunan KLHS RDTR	1	Dokumen	1				300,000,000	
Mempertahankan kualitas lingkungan hidup	Terjaganya kualitas air sungai	< 5	<5	<5	<5		program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	90%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik / objek yang dipantau	28	Perusahaan	8	8	8	4	89,999,750	
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya Data emisi gas rumah kaca / tahun	406,000	ton CO2 eq	406,000				84,999,650	
										Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah hasil Uji Laboratorium	50	Dokumen	25	25			144,999,400	

										Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah titik objek monitoring	3	Sungai	1	1	1		75,000,000	
										Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik area yg dipantau/monitoring	20	Perusahaan	20				75,000,000	
										Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik area yg dipantau/monitoring	20	Perusahaan	20				75,000,000	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan	13	kali	4	5	4	4	100,000,000	
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan	13	kali	13				80,000,000	
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan	4	kali	4				80,000,000	
										Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan	4	kali	4				80,000,000	

									Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yg dilakukan	4	kali	4				80,000,000		
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	90%	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya RTH Publik di perkotaan	4	Lokasi	4				4,379,125,740	
										Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Bertambahnya RTH Publik yang dibangun dan RTH Publik yang direnovasi	4	Lokasi	4				510,000,000	
							PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah B3 dan Limbah B3 yang tertangani	90%	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Tertibnya perizinan limbah B3	20	Dokumen	5	7	5	3	74,993,000	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha kegiatan yang diawasi ketatannya terhadap izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah/kota	90%	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Ijin Lingkungan dan/atau Ijin PPLH	Jumlah rekomendasi yg diterbitkan	100	Dokumen	25	25	25	25	80,000,000	
										Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Ijin Lingkungan Hidup, Ijin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha yg dibina dan diawasi	20	Pelaku Usaha dan/ atau Kegiatan	5	5	3	2	99,999,900	

							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasayarakatan	Kepedulian masyarakat terhadap kampung iklim	1	Kampung	1				64,990,550	
										Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari lingkungan hidup sedunia	2	Event		1	1		59,885,400	
	Mewujudkan Pengelolaan dan Penataan taman,Penerangan Jalan Serta Dekorasi Kota	Meningkatnya taman dan ruang terbuka hijau menuju Berau yang bersih, hijau dan sehat	4							Penyelenggaraan penyeluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah sekolah mendapatkan adiwiyata	3	Sekolah	1	1	1		69,999,650	
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselesaikannya jumlah pengaduan masyarakat	90%	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat yg ditangani	7	Pengaduan	2	2	3		74,978,500	
	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3	33				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terkelolanya sampah	90%	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen JAKSTRADA Pengelolaan Sampah	0	Dokumen					0	
	Mewujudkan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	Meningkatnya penataan lingkungan dan pengawasan ijin pembuangan air limbah dan	100							Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan	Meningkatnya Persentase Pengurangan Sampah Melalui 3R	26	ton	26				250,000,000	
										Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengkangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yg terangkut / volume pengangkutan sampah	73%	Presentase	73%				5,610,042,496	

DAFTAR URUT KEPANGKATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU
PER 31 Desember 2022

NO.	NAMA	N I P	PANGKAT			JABATAN			Masa Kerja Gol			Lathian Jabatan			PENDIDIKAN					USIA	DATA LAIN-LAIN		
			Unit Kerja	Gol.	t. m. t	NAMA	ESE.	T.M.T	THN	BLN	NAMA	LLS	JAM	NAMA	JURUSAN	LLS	GELAR	TK	TGL LAHIR		TEMPAT	LIP	AGAMA
																					21		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	drh. Mustakim Suharjana	19670327 199403 1 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/c	01.04.20	Kepala Dinas	IIb	02/01/2019	27	9	1. ADUM 2. ADUMLA 3. PIM Tk. III 4. PIM Tk. II	1996 1999 2009 2016		universitas Gajah Mada Yogyakarta	S2-Profesi Fakultas Kedokteran Hewan	1991 1992	Pasca Sarjana	S2	27 Maret 1967	55	Bantul	L	Islam
2	H. Masrani,SP Karpeg.	19710614 199803 1 006	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/b	01.04.2019	Sekretaris	III.a	05/03/2018	23	9	1. Diklat PIM IV 2. Diklat III	2003 2014 285 839		Universitas Mulawarman	Sarjana Pertanian	1996	Sarjana	S1	14 Juni 1971	64	Samarinda	L	Islam
3	Agus Bambang,S.Hut,M.Sc Karpeg. J. 015951	19710801 200003 1 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/a	01.04.15	Kabid. Tata Lingkungan	III.b	17/12/2018	21	10	-	-	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Magister Perencanaan Pengelolaan Pesisir & DAS	2009	Pasca Sarjana	S2	08 Januari 1971	51	Gunung Tabur	L	Islam	
4	Mesmanur,ST.,M.Si Karpeg. J. 065867	19690615 200012 1 004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/a	01.04.17	Kabid. Penaatan dan Kapasitas LH	III.b	13/08/2019	21	1	Diklat PIM IV	2009	Universitas Mulawarman	Ilmu Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan	2016	Pasca Sarjana	S2	15 Juni 1969	53	Bone	L	Islam	
5	M. Suhani,S.Hut., M.Si Karpeg L. 110521	19730316 200212 1 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/a	01.04.18	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup*	IV.a	01/03/2018	19	1	Diklat PIM IV			Universitas Mulawarman	Ilmu Ekonomi	2016	Pasca Sarjana	S2	16 Maret 1973	49	Tanjung Redeb	L	Islam
6	Ida Ayu. S.PI,MP Karpeg L. 110530	19751002 200212 2 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/a		Kabid PPKLH	III.b	04/04/2022						Universitas Mulawarman	Manajemen Pesisir	2014	Pasca Sarjana	S2	2 Oktober 1975	48	Berau	P	Islam
7	Anwar, S.ST Karpeg. G. 169607	19701231 199401 1 003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/a	01.04.21	Kabid. Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	III.b	02-03-19	25	0	Diklat PIM IV	2013 285		Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Bandung	Ilmu Sosial	2001	Sarjana	D-IV	31 Desember 1970	52	Dori Dunga	L	Islam
8	Irwadi Ahmadi Siregar, S.T., M.E Karpeg. M. 153869	19780618 200502 1 004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/a	01.04.2021	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	30/07/2013	16	2	Diklatpim IV	2013 285		Univ. Mulawarman	Ilmu Ekonomi	2019	Pasca Sarjana	S2	18 Juni 1978	44	Panompun Julu	L	Islam
9	Hj. Leni Zakiah, S.PI., M.A.P	19720619 199803 2 002	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	IV/a	01.10.2022	Perencana Muda*	IV.a	03/01/2020	24	4	Adum	2002 250		Universitas Terbuka	Administrasi Publik	2021	Pasca Sarjana	S2	19 Juni 1972	50	Samarinda	P	Islam
10	Hj. Pelita Hati, SE Karpeg. G. 033458	19690907 199803 2 006	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2009	Kasubbag. Keuangan dan Aset	IV.a	03/11/2014	26	10	Adum	1999 250		STIEM Tanjung Redeb	Manajemen	1999	Sarjana	S1	07 September 1969	53	Tanjung Redeb	P	Islam
11	Dian Novita Kusniarsih,S.Sos Karpeg. L. 058443	19801112 200112 2 000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2016	Kepala UPTD Kebersihan Talisayan	IV.a	13/08/2019	16	3	Diklatpim IV	2012 285		Universitas Tridharma	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	2002	Sarjana	S1	10 Desember 1980	42	Talisayan	P	Islam
12	Andi Ristyono,ST Karpeg L. 110503	19720906 200212 1 008	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2015	Kepala UPT TPA	IV.a	30/07/2013	15	5	Diklatpim IV	2012 285		Univ. 17 Agustus 1945 Semarang	Teknik Kimia		Sarjana Muda	S1	09 Juni 1972	50	Pati	L	Islam
13	Ibrahim Nur, S.ST Karpeg. J. 015905	19690505 199201 1 014	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2015	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	30-12-2017	25	10	Diklatpim IV	2013 321		Politeknik Kesehatan Samarinda	Keperawatan Medikal Belah	2011	Sarjana	DIV	05 Mei 1969	53	Samarinda	L	Islam
14	Astiani, ST Karpeg. N 002887	19800426 200604 2 014	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2019	Kepala TU UPT TPA	IV.b	04/04/2022	13	6	Diklatpim IV	2014 881		Universitas Lambung Mangkurat	Teknik Arsitektur	2005	Sarjana	S1	26 April 1980	42	Balikpapan	P	Islam
15	Yulianti Indria Sari,ST Karpeg. M. 096754	19790227 200502 2 002	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2017	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup*	IV.a	23-05-2012	16	11	Diklatpim IV	2013 285		Univ. Pemnas Veteran Jogyakarta	Teknik Pertambangan	2003	Sarjana	SI	27 Februari 1979	43	Tanjung Redeb	P	Islam
16	Jusram Aris, SH Karpeg. M. 153887	19740510 200502 1 002	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2017	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	28/01/2015	17	1	Diklatpim IV	2017 -		Univ. Sulawesi Tenggara Fak. Hukum	Ilmu Hukum	2001	Sarjana	S1	10 Mei 1974	48	Pattimpa	L	Islam
17	M. Teddy Palapa, S.Hut Karpeg. L. 110520	19771221 200212 1 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2017	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	28/09/2017	19	1	Diklatpim IV	2013 285		Univ. Lambung Mangkurat Fak. Kehutanan	Teknik Hasil Hutan	2002	Sarjana	S1	21 Februari 1977	45	Tidung Pala	L	Islam
18	Ramadiansyah,S.Hut Karpeg. G.451564	19770901 199703 1 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2018	Pengelola Informasi Lingkungan	-	-	19	10	Diklatpim IV	2012 285		Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Kehutanan	2004	Sarjana	S1	09 Januari 1977	45	Berau	L	Islam
19	Didik Riyanto,S.A.PI Karpeg. N. 241170	19750207 200604 1 009	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2018	Kepala UPT Kebersihan PL Derawan dan Maratus	IV.a	13/08/2019	19	11	Diklatpim IV	2012 285			D-IV Perikanan	2008	Sarjana	D-IV	07 Februari 1975	47		L	Islam
20	Adi Rakhmady,S.Hut Karpeg. J.018652	19790912 199903 1 002	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2018	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan Dan Kawasan Konservasi	-	-	17	10				Universitas Mulawarman Samarinda	Kehutanan	2006	Sarjana	S1	12 September 1979	43	Tanjung Redeb	L	Islam
21	Sri Utami Wardani, ST Karpeg. N. 414835	19791203 200901 2 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2020	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	30-12-2017	17	6	Diklatpim IV	2017 893		Univ. Sarjanawiyata Taman Siswa	Teknik Industri	2003	Sarjana	S1	03 Desember 1979	43	Berau	P	Islam
22	M. Reza Pahlevi,SH	19780728 200801 1 008	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2020	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	28/12/2018	13	3	-			Univ. Widya Gama Mahakam Samarinda	Ilmu Hukum	2001	Sarjana	SI	28 Juli 1978	44	Samarinda	L	Islam
23	Muchlis, A.MD Karpeg. J. 018845	19750326 199903 1 004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2022	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup*	IV.a	28/01/2015	20	10	Diklatpim IV	2017 -		Univ. Hasanudin Makassar Fak. POLITEKNIK	Teknik Kimia	1996	Sarjana Muda	DIII	23 Maret 1975	47	Gunung Tabur	L	Islam

24	Ishak Abdillah, S. Hut Karpeg. Q. 202200	19750425 201001 1 012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2018	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup*	IV.a	17-12-2018	17	2	Diklatpim IV	2021	830	Univ. Lambung Mangkurat Fakultas Kehutanan	Kehutanan	2003	Sarjana	SI	25-Apr-75	47	Teluk Bayur	L	Islam
25	Yuni Astut Suhanda, A.Md Karpeg. J. 006159	19780615 200012 2 001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2022	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	28/12/2018	-	-	-	-	-	Akademi Kesling Banjarbaru	Kesehatan Lingkungan	1999	Sarjana Muda	DIII	15 Juni 1978	44	Murung Pudak	P	Islam
26	Helmi, SE Karpeg. No. P. 416066	19800710 200901 1 004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/c	01.04.2019	Pengawas Lingkungan Hidup*	IV.a	10/05/2016	8	11	Diklatpim IV	2021	830	STIEM Tanjung Redeb	Ekonomi Manajemen		Sarjana	S1	10 Oktober 1980	42	Tanjung Redeb	L	Islam
27	Farida, ST Karpeg. Q.247266	19870612 201101 2 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/c	01.04.2019	Analisis Pengamanan Lingkungan Hidup	-	-	8	3	-	-	-	Univ. Mulawarman Samarinda	Teknik Pertambangan	2010	Sarjana	S1	21 Juni 1987	35	Tanjung Redeb	P	Islam
28	Yusuf Rahmatullah, S.Sos., ME Karpeg. A.08001394	19880223 201101 1 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/c	01.04.2019	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.b	04/04/2022	11	0				Universitas Mulawarman	Ekonomi	2018	Magister	S2	23 Februari 1988	34	Berau	L	Islam
29	Agus Tri Haryanto, S.Pi Karpeg. Q.244759	19790817 201001 1 012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/c	01.10.2019	Kasubbag TU UPTD Lab	IV.b	04/04/2022	12	0	Diklatpim IV	2016	893	Universitas Mulawarman Samarinda	Budidaya Perairan	2005	Sarjana	S1	17 Agustus 1979	43	Lumajang	L	Islam
30	Eka Kusuma Hadi, ST, M.Ling Karpeg. A. 08001344	19840501 201101 1 010	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/c	01.10.2019	Pengelola Penyehatan Lingkungan	-	-	8	9	-	-	-	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	Teknik Lingkungan	2009	Sarjana	S1	1 Mei 1984	38	Tanjung Redeb	P	Islam
31	Mattingana, SE Karpeg. N.358709	19800202 200701 1 014	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/c	01.10.2022	Ka. UPTD Pertamanan Pemakaman	IV.b	14.10.2019	14	2	-	-	-	STIEM Tanjung Redeb	Ekonomi Pembangunan	2010	Sarjana	S1	2 Februari 1980	42	Ujung Pandang	L	Islam
32	Farida Kariyawati, SE Karpeg. N. 358990	19721215 200701 2 010	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/b	01-04-2019	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	13	0	-	-	-	STIEM Tanjung Redeb	Ekonomi Pembangunan	2013	Sarjana	S1	15 Desember 1972	50	Tanjung Redeb	P	Islam
33	Ani Septiani, S, SIT Karpeg. B.0801214	19890905 201503 2 004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/b	01.10.2019	Pengadministrasi Umum	-	-	6	10	-	-	-	Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang	Kesehatan Lingkungan	2011	Sarjana	DIV	05 September 1989	33	Cirebon	P	Islam
34	Murjani Karpeg. K. 045815	19790124 200012 1 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/b	01.04.2021	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	-	-	16	1	-	-	-	SMKN 1 Tanjung Redeb	Manajemen	1998	-	SLTA	24 Januari 1979	43	Singkuang	L	Islam
35	Daniel Setiawan, A.Md Karpeg. Q. 056901	19800802 201001 1 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/b	01.10.2022	Pengawas K3 dan Perlindungan Lingkungan	-	-	10	0	-	-	-	AAP Bentara Indonesia Surakarta	Akuntansi	2004	Sarjana Muda	DIII	8 Februari 1980	42	Surakarta	L	Katolik
36	Rizki Ramdiska, SE Karpeg. P.365303	19870519 200904 1 001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/b	01.04.2022	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan Hidup	-	-	12	3	-	-	-	STIEM Tanjung Redeb	Ekonomi Pembangunan	2011	Sarjana	S1	19 Mei 1987	35	Sambalung	L	Islam
37	Bambang Winarke Karpeg. P. 533761	19851130 200901 1 001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/a	01.04.2019	Pengelola Laboratorium	-	-	13	0	-	-	-	STIEM	Ekonomi Manajemen	2012	Sarjana	S1	30 Nopember 1985	37	Labanan Makarti	L	Islam
38	Awaluddin, A. Md	19751231 200604 1 046	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/a	1/10/2019	Kasubbag TU UPTD Kebersihan Derawan dan Maratua	IV.b	04/04/2022						Poltekkes Kemenkes Kaltim	Keperawatan	2014	Diploma	D3	31 Desember 1975	47	Lagoari	L	Islam
39	Arisandi Pratiwi, ST	19910323 202203 2 006	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/a	3/1/2022	Penyuluh Lingkungan Hidup	-	-	0	0				Universitas Islam Indonesia	Teknik Lingkungan	2013	Sarjana	S1	23 Maret 1991	32	Berau	P	Islam
40	Novita Sari Denni Anggraini, ST	19961126 202203 2 011	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/a	3/1/2022	Penyuluh Lingkungan Hidup	-	-	0	0				Universitas Mulawarman	Teknik Lingkungan	2019	Sarjana	S1	28 Nopember 1996	26	Berau	P	Islam
41	Dedi Tulistawan, A.Md Karpeg. Q. 249132	19810517 201101 1 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/a	01.04.20	Pengelola Informasi Lingkungan	-	-	9	0	-	-	-	STMIK Bandung	Manajemen Informatika	2004	Sarjana Muda	DIII	17 Mei 1981	41	Berau	L	Islam
42	Mulyadi Karpeg. N. 240965	19730310 200604 1 016	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/a	01.04.2022	Pengadministrasi Keuangan/Pembantu Bendahara	-	-	16	2	-	-	-	SMA	IPS		SMA		10 Maret 1973	49	Gunung Tabur	L	Islam
43	Gualta Karpeg. N. 355130	19650513 200701 1 015	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2019	Pengawas Lapangan Petugas Pertaman dan Pemakaman	-	-	19	0	-	-	-	SMA	IPS	1988	-	-	13 Mei 1965	57	Lotaq	L	Kristen
44	Zainal Abidin Karpeg. N. 358857	19720614 200701 1 024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2019	Juru Pungut Kebersihan	-	-	19	5	-	-	-	SMA	IPS	1996	-	-	14 Juni 1972	50	Sungai Kupang	L	Islam
45	Toni Karpeg. N. 355113	19730613 200701 1 014	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2019	Pramu Kebersihan	-	-	20	0	-	-	-	SMA	IPS	1993	-	-	13 Juni 1973	49	Berau	L	Islam
46	Muhammad Harmain N.355156	19791223 200701 1 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2019	Pengelola Informasi Lingkungan	-	-	17	3	-	-	-	SMA	IIPS	1999	-	-	23 Desember 1979	43	Tanjung Redeb	L	Islam
47	Muchain Syafei Karpeg. N. 355156	19791002 200701 1 007	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2019	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	-	-	19	4	-	-	-	SMA	IPS	2000	-	-	02 Oktober 1979	43	Tanjung Redeb	L	Islam
48	Aswi Chandra Karpeg. N. 355160	19800624 200701 1 012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2019	Pengawas Lapangan Pengangkutan Sampah	-	-	18	11	-	-	-	SMK 1 Tanjung Redeb	Perdagangan	1998	-	-	24 Juni 1980	42	Berau	L	Islam
49	Duasama Fernando Karpeg. N.355160	19810127 200701 1 003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.04.2019	Bendahara Pengeluaran	-	-	19	6	-	-	-	SMK	Keuangan	1999	-	-	27 Januari 1981	41	Purbatua	L	Islam
50	Mus Muliadi Karpeg. P.155375	19820101 200701 1 012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	III/d	01.10.2019	Verifikator Keuangan	-	-	19	6	-	-	-	SMA	IPS	2001	-	-	01 Januari 1982	40	Teluk Bayur	L	Islam

51	Rizal Syafrianyah Karpeg.	19771229 200701 1 012	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	1/4/2019	Pengelola Informasi Lingkungan	-	-	18	11	-	-	-	MAN		1997		29 Desember 1977	45	Tanjung Redeb	L	Islam
52	Abdul Wahab	19770806 2007401 1 016	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	4/1/2020	Pengawas lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran, dan Selokan	-	-	14	11	-	-	-	SMA	IPS	1996	-	06 Agustus 1977	45	Talisayan	L	Islam
53	Irianto Karpeg. P. 155375	19670628 200801 1 009	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	4/1/2020	Pramu Kebersihan	-	-	15	10	-	-	-	SMEA		1989	-	28 Juni 1967	55	Berau	L	Islam
54	Didik Hariadi Karpeg. 155578	19800820 200801 1 017	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	4/1/2016	Pengawas Lapangan Petugas Taman dan Pemakaman	-	-	18	11	-	-	-	SMA	IPS	2001	-	20 Agustus 1980	42	Mojokerto	L	Islam
55	Bambang Karpeg. P. 155314	19830330 200801 1 009	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	10/1/2020	Pramu Kebersihan	-	-	18	7	-	-	-	SMA	IPS	2002	-	30 Maret 1983	39	Berau	L	Islam
56	Muhammad Sabaruddin Karpeg. P. 155376	19810325 200901 1 001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	4/1/2021	Pengeawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan	-	-	18	11	-	-	-	SMA	IPS	2000	-	25 Maret 1981	41	Tanjung Redeb	L	Islam
57	Suprianto Salada Karpeg. P. 155578	19820715 200801 1 018	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	4/1/2020	Bendahara Penerimaan	-	-	16	10	-	-	-	SLTA Kejuruan	IPS	2001	-	15 Juli 1982	40	Ujung Pandang	L	Kristen
58	Agus Sofyan Karpeg. O. 248588	19720815 200901 1 004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/c	01.10.2018	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan	-	-	13	9	-	-	-	SLTA	IPS	1992	-	15 Agustus 1972	50	Teluk Bayur	L	Islam
59	Muhsin Karpeg B 08014240	19790308 201001 1 020	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/c	01.10.2019	Juru Pungut Kebersihan	-	-	17	0	-	-	-	SMA	IPA	1998	-	8 Maret 1979	43	Samburakat	L	Islam
60	Rosita Karpeg. N. 355169	19750130 200701 2 011	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/c	01.04.2020	Pengelola Keuangan	-	-	20	6	-	-	-	Paket C	IPS	1994	-	30 Januari 1975	47	Tanjung Batu/Berau	P	Islam
61	Tasmin Karpeg. A. 08003514	19800721 201212 1 002	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/c	4/1/2021	Pengawas Lapangan	-	-	16	11	-	-	-	SMU	IPS	2000	-	21 Juli 1980	42	Bohe Bukit/Bukit	L	Islam
62	Suyono Karpeg. N. 358879	19730403 200701 1 025	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/b	01.04.2019	Pengawas Lapangan Pengangkutan Sampah	-	-	13	2	-	-	-	SMP	-	1990	-	03 April 1973	49	Berau	L	Islam
63	Jalani Karpeg. N. 358879	19720308 200701 1 024	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/b	01.04.2019	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan	-	-	13	2	-	-	-	SMP	-	1990	-	8 Maret 1972	50	Berau	L	Islam
64	Jefri Rastianto Karpeg. P.414888	19740330 200801 1 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/b	4/1/2020	Pengolah Sampah	-	-	13	10	-	-	-	SMP	-	1992	-	30 Maret 1974	48	Jakarta	L	Islam
65	Ronald Low Karpeg. P.414888	19841002 200801 1 006	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/a	01.04.2020	Penyuluh Lingkungan Hidup	-	-	14	2	-	-	-	Paket C	-	2011	-	2 Oktober 1984	38	Sion	L	Kristen
66	Narsan Karpeg. P.546858	19800812 200801 1 018	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/a	01.04.2020	Pengawas lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran, dan Selokan	-	-	14	9	-	-	-	Madrasah Tsanawiah	*	1997	-	12 Agustus 1980	42	Ujung Lero	L	Islam
67	M. Runsyah Karpeg. N. 358975	19691130 200701 1 016	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	01.04.2019	Pengadministrasi Sarana & Prasarana	-	-	17	3	-	-	-	SD	-	1982	-	30 Nopember 1969	53	Balikpapan	L	Islam
68	Rusman Karpeg. P. 155727	19690305 200701 1 036	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	01.04.2019	Pengawas Lapangan Petugas Taman dan Pemakaman	-	-	17	0	-	-	-	SD	-	1984	-	5 Maret 1969	53	Berau	L	Islam
69	Samsul Aeri Karpeg. B 08000193	19651007 201212 1 003	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/a	01.04.2021	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan TPA	-	-	13	3	-	-	-	MTS	-	1981	-	7 Oktober 1965	37	Sumbawa	L	Islam
70	Yuliana Langi Karpeg. 358807	19680730 200701 2 017	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	01.04.2019	Pengelola Sampah	-	-	16	3	-	-	-	SD	-	1986	-	30 Juli 1968	54	Manado	P	Kristen
71	Salim	19690729200701 1 023	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	01.04.2019	Juru Pungut Kebersihan	-	-	16	3	-	-	-	SD	-	1984	-	29 Juli 1969	53	Tarakan	I	Islam
72	Antonius Afrido Karpeg. P. 155544	19791103 200801 1 022	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/d	01.04.2020	Pengawas Lapangan Petugas Taman dan Pemakaman	-	-	17	2	-	-	-	SD	-	1994	-	03 Nopember 1979	43	Flores/Tomu	L	Kristen
73	Jamilah Karpeg. P 416078	19650520 200901 2 001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/c	01.04.2020	Pramu Kebersihan	-	-	15	3	-	-	-	SD	-	2004	-	20 Mei 1965	57	Berau	P	Islam
74	Abdul Fatah Karpeg. P. 533704	19780305 200901 1 005	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/c	01.10.2017	Pramu Laboratorium	-	-	14	8	-	-	-	PAKET B	-	2011	-	5 Maret 1978	44	Berau	L	Islam
75	Said Hasan Karpeg. B. 08000194	19760802 201212 1 001	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	II/c	01.04.2021	Pramu Kebersihan	-	-	19	2	-	-	-	SD	-	1990	-	2 Agustus 1976	46	Berau	L	Islam

Tanjung Redeb, 31 Desember 2022

Kepala DLHK Kab. Berau

dth. Mustakim Suharjana
Pembina Utama Muda
NIP. 19670327 199403 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
 Bidang : Bidang Lingkungan Hidup
 Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Sub Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 U P B : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO. KODE LOKASI : 12.02.23.02.16.01.01.01.2022 Extra

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.01.003.012.025	Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul)	000001 s/d 000010	crocodile / bertangkai	1,2 cm	besi	2022						Pembelian	1,99	peralatan bidang kebersihan
2	1.3.2.01.003.012.025	Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul)	000011 s/d 000030	CROCODILE / BERTANG KAI PANJANG MODIFIKASI		BESI	2022						Pembelian	2,97	PERALATAN BIDANG KEBERSIHAN L3
3	1.3.2.02.002.001.002	Gerobak Dorong	000006	Arco / roda 1		besi	2022						Pembelian	0,72	digunakan UPT pertamanan
4	1.3.2.02.002.001.002	Gerobak Dorong	000007 s/d 000008	Arco / roda1		besi	2022						Pembelian	1,44	peralatan UPT pertamanan
5	1.3.2.03.001.006.012	Gergaji Chain Saw	000037 s/d 000040	sthill		besi	2022						Pembelian	1,30	Rantai chain Saw untuk peralatan kebersihan
6	1.3.2.03.002.006.007	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	000002	krisbow / kunci ring pas		besi	2022						Pembelian	1,00	peralatan bidang kebersihan dan limbah b3
7	1.3.2.04.001.001.007	Garpu Besi	000021 s/d 000029	-		besi	2022						Pembelian	0,67	garpu sampah peralatan bidangkebersihan dan LB3
8	1.3.2.05.002.006.057	Karpet	000006 s/d 000048	crocodile / TERPAL	4X6	pelastik	2022						Pembelian	21,05	TERPAL PENUTUP MOBIL PENGANGKUT SAMPAH BIDANG KEBERSIHAN
9	1.3.2.09.002.002.005	Golok	000001 s/d 000008	corocodile		besi	2022						Pembelian	1.496,00	parang peralatan bidang kebersihan Dan lb3



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

	Jumlah Harga	1.527,14	
--	---------------------	----------	--

MENGETAHUI
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kebersihan

Tanjung Redeb, 1 Januari 2022
PENGURUS BARANG PENGUNA

H.SUJADI.A.Pi

NIP. 19631121 199003 1 004

MUCHSIN SAPEI

NIP. 19791002 200701 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
Bidang : Bidang Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Sub Unit Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
U P B : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

NO. KODE LOKASI : 12.01.23.02.16.01.01.01.2022

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Register		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Taman Permanen	1.3.3.01.001.036.001	000007	Baik	Tidak	BETON	23	Jl. H Isai III Tanjung Redeb	1/1/2022	03/PPK/Taman.H .ISA III/PSPKH/DLHK/ VIII2022				Pembelian	216.396,00	Perencanaan Rp20,019,000 + Pengawasan Rp9,213,000 + Fisik 100% -Rp187,164,000 Total Rp216,396,000
2	Taman Permanen	1.3.3.01.001.036.001	000008	Baik	Tidak	BETON	500	Jl. Milono Tanjung Redeb	11/24/2022	03/PPK/RTS/PSP KH/DLHK/XI/202 2				Pembelian	149.347,00	Perencanaan Rp10,434,000 + Pengawasan Rp7,392,000 + Fisik 100% Rp131,521,000 Total Rp149,347,000
3	Taman Permanen	1.3.3.01.001.036.001	000009	Baik	Tidak	BETON	23	jl. Apt.pranoto kec Tanjung Redeb	11/25/2022	03/PPK/RTC/PSP KH/DLHK/XI/202 2				Pembelian	149.321,00	Perencanaan Rp10,434,000 + Pengawasan Rp7,392,000 + Fisik 100% Rp131,495,000 Total Rp149,321,000
4	Taman Semi Permanen	1.3.3.01.001.036.002	000001	Baik	Tidak	BETON	50	Murjani III Kel Gunung Panjang Kec Tanjung Redeb	9/13/2022	03/PPK/Taman Murjani III/PSPKH/DLHK/ IX/2022				Pembelian	222.959,00	Perencanaan Rp20,424,000 + Pengawasan Rp9,213,000 + FISIK 100% Rp193,322,000 Total Rp222,959,000



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

5	Makam Bersejarah	1.3.3.02.001.003.004	000002	Baik	Tidak	BETON	500	Jl. Bukit Ria Kel .Gunung Panjang .Kec. Tanjaung Redeb	4/27/2022	03/PPK/Lanj-PLP-COVID 19 PSPKH/ DLHK/IV/2022		Pembelian	217.351,00	Perencanaan Rp20,394,000 + Pengawasan Rp9,213,000 + Fisik 100% Rp187,744,000 Total Rp217,351,000
6	Makam Bersejarah	1.3.3.02.001.003.004	000003	Baik	Tidak	BETON	50	Jl. Mulawarman Gg Rahayu Kelurahan Bugis	11/24/2022	03/PPK/KUBURAN GG RAHYU/PSPKH/XI /2022		Pembelian	199.321,00	Perencanaan Rp12,465,000 + Pengawasan Rp8,824,000 + Fisik 100% -178,032,000 Total Rp199,321,000
7	Makam Bersejarah	1.3.3.02.001.003.004	000004	Baik	Tidak	Tidak	900	KEC GUNUNG TABUR	11/24/2022	02/PPK/Pem-Ihn-K- BADDIT SIPATTUNG/DLHK/XI/2022		Pembelian	172.667,00	Perencanaan Rp13,653,000 + Pengawasan Rp9,685,300 Fisik 100% Rp149,329,000. Total Rp172,667,000
8	Pagar Permanen	1.3.3.04.001.004.001	000063	Baik	Tidak	Beton	15	Jalan APT Pranoto	11/17/2022	05/DLHK/PEMRU TKANTOR./XI/2022		Pembelian	48.390,29	Pekerjaan Pembuatan Pagar Kantor
Jumlah Harga													1.375.752,29	

MENGETAHUI

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan

H.SUJADI.A.PI

NIP. 19631121 199003 1 004

Tanjung Redeb, 1 Januari 2022

PENGURUS BARANG PENGUNA

MUCHSIN SAPEI

NIP. 19791002 200701 1 007